

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJALIN KERJA
SAMA MILITER KHUSUSNYA DI SEKTOR MARITIM DALAM
KERANGKA KERJA SAMA DCA DENGAN AMERIKA SERIKAT PADA
TAHUN 2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NAUFAL ZAYYAN

21323309

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJALIN KERJA
SAMA MILITER KHUSUSNYA DI SEKTOR MARITIM DALAM
KERANGKA KERJA SAMA DCA DENGAN AMERIKA SERIKAT PADA
TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NAUFAL ZAYYAN

21323309

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjalin Kerja sama Militer
Khususnya di Sektor Maritim dalam Kerangka Kerja sama DCA dengan
Amerika Serikat pada Tahun 2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

30 Januari 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 2 Khairul Munzilin, S.I.P., M.A.
- 3 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.
- 4 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

09 Januari 2026,



Naufal Zayyan

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS.....	iv
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR SINGKATAN.....	6
DAFTAR DIAGRAM.....	7
ABSTRAK.....	9
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka.....	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	8
1.7 Argumen Sementara.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
<i>1.8.1 Jenis Penelitian.....</i>	<i>13</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....</i>	<i>13</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>13</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian.....</i>	<i>14</i>
1.9 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB 2.....	16
KERJA SAMA KEAMANAN MILITER MARITIM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.....	16
2.1 Sejarah Kerja Sama Militer Indonesia dan Amerika Serikat.....	16
2.2 Kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat dalam Kerja Sama Pertahanan Militer di Sektor Maritim.....	19
2.3 Deskripsi Defense Cooperation Agreement (DCA) Indonesia dan Amerika Serikat.....	22
BAB 3.....	26
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJALIN KERJA SAMA PERTAHANAN MILITER KHUSUSNYA DI SEKTOR MARITIM DENGAN AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2023.....	26
3.1 Faktor Internal.....	26
<i>3.1.1 Non-Human Environment.....</i>	<i>27</i>
<i>3.1.2 Society.....</i>	<i>32</i>
<i>3.1.3 Human Environment.....</i>	<i>36</i>

3.2 Faktor Social Structure and Behaviour.....	42
3.3 Faktor Eksternal.....	46
3.3.1 <i>Non-Human Environment.....</i>	47
3.3.2 <i>Other Cultures.....</i>	50
3.3.3 <i>Other Societies.....</i>	55
3.3.4 <i>Societies Organized and Functioning as States and Government Action.....</i>	59
BAB 4.....	66
PENUTUP.....	66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Rekomendasi.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Bakamla	: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
BIN	: Badan Intelijen Negara
CARAT	: <i>Cooperation Afloat Readiness and Training</i>
DCA	: <i>Defense Cooperation Arrangement</i>
DoD	: <i>Department of Defense</i> (Amerika Serikat)
FONOPs	: <i>Freedom of Navigation Operations</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
IMET	: <i>International Military Education and Training</i>
IMSS	: <i>Integrated Maritime Surveillance System</i>
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemhan	: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
LCS	: Laut Cina Selatan
LSI	: Lembaga Survei Indonesia
MDA	: <i>Maritime Domain Awareness</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
USINDOPACOM	: <i>United States Indo-Pacific Command</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Kerangka Teori Decision Making	9
Diagram 2. Analisis Teori Decision Making	64

ABSTRAK

Dinamika keamanan maritim kawasan Indo-Pasifik pada tahun 2023 ditandai oleh meningkatnya pelanggaran kedaulatan laut dan intensitas kehadiran aktor eksternal di wilayah perairan strategis Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama pertahanan militer di sektor maritim dengan Amerika Serikat melalui kerangka Defense Cooperation Agreement (DCA). Penelitian ini menggunakan pendekatan *Foreign Policy Decision-Making* dari Richard C. Snyder dengan menitikberatkan pada interaksi antara *setting internal* dan *setting eksternal* dalam proses pengambilan keputusan. Analisis menunjukkan bahwa keterbatasan kapabilitas pengawasan maritim, tekanan opini publik domestik, serta kebutuhan modernisasi pertahanan menjadi faktor internal yang signifikan. Sementara itu, dinamika geopolitik Indo-Pasifik, meningkatnya aktivitas negara besar di Laut Cina Selatan, dan kepentingan strategis Amerika Serikat membentuk lingkungan eksternal yang turut mempengaruhi kebijakan Indonesia. Interaksi kedua setting tersebut membentuk kebijakan kerja sama pertahanan maritim yang bersifat adaptif, pragmatis, dan tetap berada dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif.

Kata kunci: keamanan maritim, kerja sama pertahanan, Indonesia–Amerika Serikat, pengambilan keputusan, DCA

ABSTRACT

The maritime security dynamics of the Indo-Pacific in 2023 were marked by increasing violations of maritime sovereignty and the growing presence of external actors in Indonesia's strategic waters, particularly the North Natuna Sea. These developments encouraged the Indonesian government to strengthen maritime defense cooperation with the United States through the Defense Cooperation Agreement (DCA). This study employs Richard C. Snyder's Foreign Policy Decision-Making approach, focusing on the interaction between internal and external settings in shaping policy decisions. The analysis reveals that limited maritime surveillance capabilities, domestic public pressure, and defense modernization needs constituted key internal factors. Externally, Indo-Pacific geopolitical dynamics, intensified activities of major powers in the South China Sea, and U.S. strategic interests significantly influenced Indonesia's policy orientation. The interaction of these internal and external settings produced a maritime defense cooperation policy that is adaptive and pragmatic, while remaining consistent with Indonesia's free and active foreign policy principle.

Keywords: maritime security, defense cooperation, Indonesia–United States, decision-making, DCA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat di sektor maritim merupakan bagian penting dari hubungan bilateral yang telah terjalin selama beberapa dekade. Dalam konteks kontemporer, kerja sama ini semakin relevan mengingat kompleksitas tantangan keamanan maritim yang dihadapi Indonesia, terutama di wilayah perairan strategis seperti Laut Natuna Utara. Kawasan ini kerap menjadi sorotan internasional akibat meningkatnya ketegangan yang dipicu oleh klaim sepihak dan aktivitas militer Tiongkok yang memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga kedaulatan maritim dan sekaligus berkontribusi dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang kini menjadi pusat dinamika geopolitik global (Davis 2023).

Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengadopsi visi *poros maritim dunia* yang memperkuat komitmen nasional terhadap pengembangan sektor maritim, termasuk dari aspek pertahanan dan keamanan. Visi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas militer, khususnya di bidang maritim, guna menghadapi berbagai ancaman eksternal. Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dengan negara mitra yang memiliki kapabilitas maritim unggul menjadi salah satu instrumen strategis untuk mempercepat peningkatan kapasitas pertahanan nasional. Amerika Serikat dipandang sebagai mitra strategis karena memiliki kekuatan angkatan laut terbesar

di dunia, keunggulan teknologi pengawasan maritim, pengalaman operasional di kawasan Indo-Pasifik, serta kepentingan yang sejalan dalam menjaga stabilitas dan kebebasan navigasi di jalur laut internasional (Burgess 2023).

Keputusan Indonesia untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat di sektor maritim juga didorong oleh keterbatasan kapasitas pertahanan nasional dalam menghadapi spektrum ancaman maritim yang semakin kompleks. Melalui kerja sama ini, Indonesia memperoleh akses terhadap peningkatan *maritime domain awareness*, interoperabilitas militer, latihan bersama, serta dukungan terhadap modernisasi alat utama sistem persenjataan. Dengan demikian, kerja sama pertahanan maritim dengan Amerika Serikat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi sarana strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan pengamanan wilayah laut secara lebih efektif dan berkelanjutan. Keputusan untuk menjalin dan memperkuat kerja sama pertahanan ini tentu bukan hal yang sederhana. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai pertimbangan strategis dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya, terutama dalam menghadapi situasi yang menuntut peningkatan kapasitas pertahanan secara cepat dan efisien, namun tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Berbagai faktor, baik dinamika politik domestik, kepentingan nasional jangka panjang, maupun tekanan eksternal dari lingkungan strategis kawasan, turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah, termasuk dalam memilih Amerika Serikat sebagai mitra kerja sama pertahanan maritim yang dinilai paling menguntungkan dalam jangka panjang (Sukma 2023).

Salah satu manifestasi nyata dari penguatan kerja sama pertahanan maritim Indonesia dan Amerika Serikat adalah penyelenggaraan latihan militer bersama *Super Garuda Shield* pada tahun 2023, yang melibatkan lebih dari 5.000 personel dari berbagai negara. Latihan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme pasukan, tetapi juga menjadi sinyal strategis atas komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan maritim melalui kerja sama dengan kekuatan militer global. Selain itu, pada akhir tahun 2023 kedua negara juga menyepakati peningkatan kerja sama patroli maritim dan penguatan kapasitas penegakan hukum di laut, yang semakin menegaskan arah hubungan strategis bilateral di sektor maritim (Strangio 2023).

Penguatan kerja sama tersebut mencapai tonggak penting dengan ditandatanganinya *Defense Cooperation Arrangement* (DCA) antara Indonesia dan Amerika Serikat pada 13 November 2023 di Washington, D.C. DCA merupakan hasil dari proses dialog dan kerja sama pertahanan yang telah berkembang sejak beberapa tahun sebelumnya, dan berfungsi sebagai kerangka hukum serta strategis bagi penguatan hubungan pertahanan bilateral. Dokumen ini ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, serta mencakup berbagai bidang kerja sama, antara lain keamanan maritim, pelatihan dan pendidikan militer, pertukaran informasi, penanggulangan terorisme, keamanan siber, dan dukungan terhadap modernisasi militer Indonesia.

Defense Cooperation Arrangement (DCA) merupakan kerangka kerja sama pertahanan yang bersifat komprehensif dan mencakup berbagai bidang kerja

sama pertahanan, seperti pendidikan dan pelatihan militer, interoperabilitas, pertukaran informasi, keamanan siber, serta penanggulangan ancaman non-tradisional. Meskipun demikian, dalam konteks hubungan Indonesia–Amerika Serikat pada tahun 2023, sektor keamanan maritim menjadi salah satu bidang prioritas yang paling menonjol. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada kerja sama pertahanan maritim sebagai bagian dari implementasi DCA (U.S. Department of Defense 2023).

Dalam kerangka implementasi DCA, kedua negara juga menyepakati *Work Plan on Maritime Security* yang secara spesifik berfokus pada penguatan kerja sama di sektor maritim, termasuk pembangunan *Maritime Training Center* di Batam serta pemberian bantuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum laut Indonesia. Dengan demikian, DCA tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi fondasi institusional yang menghubungkan berbagai bentuk kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat, khususnya dalam merespons tantangan keamanan maritim secara komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah Indonesia dalam memilih Amerika Serikat sebagai mitra strategis menjadi relevan untuk memahami arah kebijakan pertahanan maritim Indonesia serta strategi negara dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan di tengah perubahan lingkungan keamanan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memilih Amerika Serikat sebagai mitra strategis dalam kerjasama *Defence Cooperation Agreement* (DCA) pada tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memilih Amerika Serikat sebagai mitra strategis dalam kerangka kerjasama *Defence Cooperation Agreement* (DCA) pada tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap pertimbangan strategis, aktor-aktor kunci, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama pertahanan militer dengan Amerika Serikat guna meningkatkan keamanan di sektor maritim pada tahun 2023. Kajian diarahkan pada kebijakan pertahanan maritim Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemerintah dalam memilih Amerika Serikat sebagai mitra strategis, dengan menggunakan pendekatan *Decision-Making* dari Richard C. Snyder. Penelitian ini juga menelaah dinamika hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat dalam konteks keamanan maritim sejauh relevansinya terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan, tanpa membahas aspek

teknis-operasional militer, spesifikasi alutsista, maupun dampak ekonomi dari kerja sama tersebut. Dengan batasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme dan pertimbangan strategis di balik kebijakan kerja sama pertahanan militer Indonesia–Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan keamanan maritim.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka akan mencakup literatur yang relevan atau peneliti terdahulu terkait dengan kerjasama pertahanan militer Indonesia dan Amerika Serikat, keamanan di sektor maritim. Berikut adalah beberapa literatur atau penelitian terdahulu utama yang digunakan.

Bila, Haqqi, Wijayati, dan Alkhatib (2024) dalam *Jurnal Polinter* membahas pengaruh *United States–Indonesia Comprehensive Partnership Agreement* terhadap kerjasama keamanan maritim antara kedua negara dalam kurun waktu 2015–2019. Penelitian ini menjelaskan bahwa kemitraan strategis tersebut berkontribusi signifikan dalam mengurangi ancaman keamanan non-tradisional, khususnya kasus illegal fishing melalui patroli bersama, pelatihan maritim seperti Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT), serta transfer pengetahuan teknis dari US Coast Guard kepada aparat Indonesia. Meski penelitian ini memberikan fondasi kuat untuk memahami aspek teknis kerjasama maritim, fokus temporalnya terbatas sebelum 2020 dan tidak mencakup perkembangan terkini termasuk perubahan kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan regional pasca-pandemi (Bila, Haqqi, Wijayati, & Al Khatib 2024).

Penelitian lain yang memberikan gambaran kerja sama militer bilateral adalah tulisan Da Costa (2024) yang diterbitkan dalam *Indo-Pacific Defense Forum*. Artikel ini menyoroti peningkatan intensitas dan skala kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui program latihan bersama seperti *Super Garuda Shield*. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa Amerika Serikat tidak hanya berperan sebagai mitra dalam latihan militer, tetapi juga mendukung modernisasi militer Indonesia dengan bantuan teknologi dan logistik. Penelitian ini berguna untuk melihat bentuk konkret kerja sama di lapangan pada periode kontemporer, namun pendekatannya masih bersifat deskriptif dan belum mengkaji bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan secara internal oleh para pembuat kebijakan di Indonesia, termasuk bagaimana persepsi ancaman dan dinamika domestik mempengaruhi arah kebijakan luar negeri (Da Costa 2024).

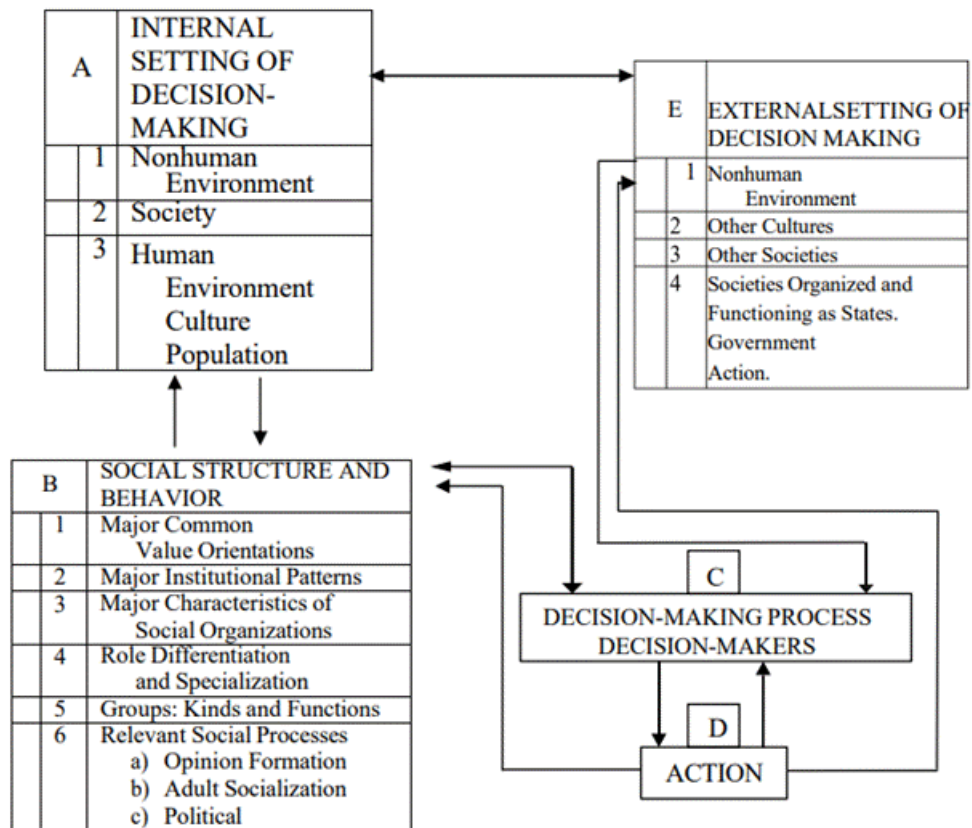
Menurut Laksmana, Evan A. Dalam jurnalnya yang berjudul "Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?" Jurnal ini menganalisis peran Indonesia sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara dan bagaimana negara ini menggunakan kebijakan luar negerinya untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan. Laksmana membahas dinamika politik dan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, termasuk ancaman yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya. Literatur ini relevan dalam memberikan perspektif mengenai bagaimana Indonesia membangun kerjasama pertahanan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk memperkuat posisi strategisnya di kawasan (Laksamana 2023).

Dari ketiga literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun kerja sama pertahanan dan keamanan maritim Indonesia dengan Amerika Serikat telah menjadi objek kajian yang penting, masih terdapat celah dalam literatur akademik. Belum banyak studi yang secara mendalam membahas bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memilih Amerika Serikat sebagai mitra strategis pertahanan di sektor maritim, khususnya dalam konteks dinamika keamanan regional tahun 2023. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan teori pengambilan keputusan (*decision-making theory*) dari Richard C. Snyder, H.W. Bruck, dan Burton Sapin.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian yang penulis lakukan kali ini, penulis memilih untuk menggunakan *Decision Making Theory* untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang sudah penulis tuliskan di atas. Penulis merasa bahwa penggunaan *Decision Making Theory* dari Richard C. Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin dapat memberikan jawaban yang tepat terkait rumusan masalah dari penelitian ini. Dalam buku yang berjudul *Foreign Policy-Decision Making* menurut Burto Sapin, H.W.Bruck, & Richard Snyder *Decision making* merupakan suatu proses yang menghasilkan pemilihan dari sejumlah rencana atau program alternatif yang didefinisikan secara sosial dan terbatas. Nantinya salah satu program atau rencana ditujukan untuk menghasilkan keadaan masa depan tertentu yang dicita-citakan oleh para pengambil keputusan (Snyder, Bruck, & Sapin 2002, 60-65).

Gambar 1. Kerangka Teori Decision Making



Sumber: (Snyder, Bruck, & Sapin 2002)

Snyder dan rekannya berpendapat bahwa pengambilan kebijakan setidaknya mempunyai empat aspek utama yaitu mempertimbangkan faktor dalam negeri, struktur sosial dan perilaku, luar negara, pengambilan keputusan-pembuat kebijakan, & aksi dari negara tersebut (Snyder, Bruck, & Sapin 2002, 60-65).

Internal: Dalam pendekatan *decision-making*, Burton Sapin, H.W. Bruck, dan Richard C. Snyder mendefinisikan *internal setting* sebagai keseluruhan kondisi domestik yang membentuk ruang gerak dan kerangka berpikir para pengambil keputusan. Faktor internal mencakup lingkungan politik domestik,

opini publik, kondisi sosial-ekonomi, hingga posisi geografis suatu negara. Lingkungan ini menjadi wadah utama tempat para pengambil keputusan menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Faktor internal mengarah pada struktur kelembagaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti lembaga politik formal, struktur sosial-ekonomi, nilai-nilai dominan, serta organisasi birokrasi negara. Keseluruhan elemen tersebut memengaruhi cara para pengambil keputusan menafsirkan situasi, menetapkan prioritas, serta menentukan alternatif kebijakan yang dianggap paling rasional dan dapat diterima secara domestik. Dengan demikian, kebijakan luar negeri tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika dan konfigurasi lingkungan internal negara yang bersangkutan (Snyder, Bruck, & Sapin 2002, 60-65).

Social Structure and Behavior: Menurut Snyder, Bruck, dan Sapin, faktor *social structure and behavior* merujuk pada struktur sosial serta pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat dan berinteraksi secara dinamis dengan proses pengambilan keputusan. Struktur sosial meliputi orientasi nilai bersama, pola kelembagaan, karakteristik organisasi sosial, pembagian peran, serta proses sosialisasi politik yang membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap kebijakan negara. Interaksi antara struktur sosial dan perilaku masyarakat memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan global. Para pengambil keputusan mempertimbangkan bagaimana struktur sosial dan perilaku masyarakat dapat mendukung atau justru membatasi pilihan kebijakan luar negeri. Pada saat yang sama, kebijakan luar negeri yang diambil juga berpotensi memengaruhi kembali struktur sosial dan perilaku masyarakat melalui

pembentukan opini publik, proses sosialisasi politik, serta legitimasi kebijakan. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara kebijakan luar negeri dan lingkungan sosial domestik yang menjadi bagian integral dalam teori *decision-making* (Snyder, Bruck, & Sapin 2002, 60-65).

Eksternal: Faktor eksternal dalam teori *decision-making* menurut Snyder, Bruck, dan Sapin secara umum mengacu pada kondisi dan dinamika di luar batas teritorial suatu negara, termasuk tindakan, reaksi, serta kebijakan negara lain terhadap aktor dan negara pengambil keputusan. Lingkungan eksternal mencakup faktor non-manusia, perbedaan budaya, interaksi antar masyarakat, serta negara-negara lain yang berfungsi sebagai entitas politik dengan kepentingan dan tujuan masing-masing. Faktor eksternal memiliki peran vital dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, karena dalam situasi tertentu respons kebijakan sangat bergantung pada sikap, persepsi, penilaian, dan tujuan para pengambil keputusan terhadap lingkungan internasional. Snyder, Bruck, dan Sapin menegaskan bahwa faktor eksternal tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan komunikasi yang erat dengan faktor internal dalam membentuk proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan wajib mempertimbangkan pengaruh eksternal dengan tetap mengaitkannya pada kepentingan nasional serta kondisi internal negara guna menghasilkan kebijakan luar negeri yang efektif dan relevan (Snyder, Bruck, & Sapin 2002, 60-65).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan pendekatan *Foreign Policy Decision-Making* yang dikemukakan oleh Richard C. Snyder, H.W. Bruck, dan Burton Sapin, penelitian ini berargumen bahwa keputusan Pemerintah Indonesia untuk menjalin kerja sama pertahanan militer khususnya di sektor maritim dengan Amerika Serikat dalam kerangka *Defense Cooperation Agreement (DCA)* pada tahun 2023 merupakan hasil dari interaksi antara *setting internal, struktur sosial dan perilaku*, serta *setting eksternal* yang dipersepsikan oleh para pengambil keputusan. Pada faktor internal, keterbatasan kapabilitas pengawasan maritim, luas wilayah laut Indonesia, serta meningkatnya pelanggaran kedaulatan di Laut Natuna Utara mendorong kebutuhan akan modernisasi pertahanan. Dari sisi struktur sosial dan perilaku, tekanan opini publik, konsensus elite politik dan militer, serta dinamika institusional antar aktor pembuat kebijakan membentuk preferensi terhadap kerja sama pertahanan yang dinilai legitim dan dapat diterima secara domestik. Sementara itu, pada faktor eksternal, meningkatnya ketegangan geopolitik Indo-Pasifik, aktivitas negara besar di Laut Cina Selatan, serta kepentingan strategis Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas kawasan menciptakan lingkungan internasional yang memengaruhi arah kebijakan Indonesia. Interaksi ketiga faktor tersebut membentuk keputusan Indonesia untuk memperkuat kerja sama pertahanan maritim dengan Amerika Serikat secara pragmatis dan adaptif, tanpa mengarah pada pembentukan aliansi militer formal, serta tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Peneliti akan melakukan teori dan konsep yang ada untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah. Penelitian kualitatif berupaya memaparkan secara naratif hal yang dilakukan dan dampak yang terjadi dalam kehidupan, penelitian kualitatif juga ingin mencapai tujuan untuk mendapatkan pengertian yang spesifik mengenai masalah sosial, serta penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik. Namun dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan akan menggunakan pengumpulan data literatur, analisis, kemudian diinterpretasikan. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dari buku, jurnal, artikel maupun riset terlebih dahulu (Fadli 2021). Setelah melakukan analisa, peneliti akan memaparkan hasil secara deskriptif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini akan berfokus pada Indonesia dan Amerika Serikat yang melakukan kerjasamanya di bidang pertahanan militer khususnya di sektor maritim. Objek penelitian ini adalah proses pengambilan keputusan pemerintah Indonesia dalam memilih Amerika Serikat sebagai mitra kerjasama.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini berasal dari data sekunder seperti jurnal, artikel, situs website, buku, maupun berita-berita terkait penelitian ini. Peneliti juga akan mempelajari, mengutip,

menganalisa, dan memasukkan teori atau konsep yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini akan diawali dengan mengamati terkait ranah atau lingkup topik yang akan dibahas, kemudian menemukan data-data yang berkaitan dengan topik maupun teori pendekatan yang digunakan lalu dianalisis dan dibahas menggunakan pendekatan yang akan digunakan. Penelitian akan bermula pada bagian Pendahuluan, kemudian dibahas lebih lanjut pada bagian Pembahasan dan Analisis Masalah, hingga penarikan kesimpulan akhir pada bagian terakhir penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada Bab 1 akan memuat terkait Latar Belakang terkait topik penelitian Skripsi, kemudian terdapat Rumusan Masalah dari penelitian, Tujuan Penelitian, Cakupan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran yang berisi pendekatan, Argumen Sementara, Metode Penelitian akan meliputi terkait Jenis Penelitian, Subjek serta Objek Penelitian, Metode untuk pengumpulan data dan Proses penelitian, serta yang terakhir akan memuat terkait Sistematika Penulisan penelitian.

Bab 2 akan memuat penjelasan terkait dengan Sejarah Kerjasama Militer Indonesia dan Amerika Serikat, kemudian kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerjasama pertahanan militer di sektor maritim, kemudian Deskripsi *Defense Cooperation Agreement (DCA)* antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Bab 3 Membahas analisis terhadap kerjasama pertahanan militer Indonesia dan Amerika Serikat dalam meningkatkan keamanan maritim dengan menggunakan pendekatan atau teori Decision Making Proses.

Bab 4 akan menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan akhir dari penelitian dan rekomendasi untuk peneliti berikutnya.

BAB 2

KERJA SAMA KEAMANAN MILITER MARITIM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Pada Bab ini akan mengkaji kerjasama keamanan militer maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai dasar analisis penelitian ini. Pembahasan mencakup sejarah perkembangan kerja sama militer kedua negara, kepentingan strategis Indonesia dan Amerika Serikat dalam menjalin hubungan pertahanan, serta deskripsi Defense Cooperation Agreement (DCA) khususnya di bidang keamanan maritim.

2.1 Sejarah Kerja Sama Militer Indonesia dan Amerika Serikat

Kerja sama militer Indonesia dan Amerika Serikat memiliki akar historis yang cukup dalam dan tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik regional pada masa awal Perang Dingin. Pada periode 1950-an, Washington memandang Asia Tenggara sebagai kawasan strategis yang rawan jatuh ke dalam pengaruh komunisme, sehingga Indonesia sebagai negara baru yang memiliki posisi geostrategis di jalur pelayaran internasional menjadi mitra penting dalam kalkulasi keamanan AS. Melalui *Military Assistance Program* (MAP), AS mulai memberikan dukungan berupa pelatihan perwira TNI, transfer perangkat komunikasi, serta bantuan teknis untuk modernisasi angkatan bersenjata (Leifer, 1983). Pada saat yang sama, sejumlah perwira Indonesia mulai mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan militer di akademi militer Amerika, yang kelak membentuk jejaring profesional antara kedua militer.

Memasuki dekade 1960-an, hubungan kedua negara mengalami pasang surut yang sangat dipengaruhi oleh perubahan politik domestik Indonesia. Ketegangan meningkat pada masa Demokrasi Terpimpin ketika kebijakan luar negeri Indonesia semakin menunjukkan kedekatan dengan blok Timur dan Beijing. Namun, setelah peralihan kekuasaan ke pemerintahan Orde Baru pada 1966, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia berubah menjadi lebih pragmatis dan terbuka terhadap kerja sama dengan negara-negara Barat. AS pun memperluas kembali hubungan militer melalui program *International Military Education and Training* (IMET) serta penjualan sejumlah peralatan militer taktis yang mendukung konsolidasi keamanan dalam negeri (Crouch, 1978). Pada periode ini, kerjasama kedua negara juga dipengaruhi oleh kepentingan stabilitas regional, terutama terkait konflik di Vietnam dan meningkatnya ketegangan ideologis di Asia Tenggara.

Kendati hubungan pertahanan kedua negara sempat dianggap kuat, dinamika politik pasca-Perang Dingin memunculkan berbagai tantangan baru. Krisis politik dan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pada akhir 1990-an memicu tekanan kuat dari Kongres AS, yang kemudian berdampak pada dikeluarkannya embargo ekspor senjata serta pembekuan sebagian besar kerja sama militer (Emmers, 2010). Embargo ini menandai fase ketegangan yang cukup signifikan, karena Indonesia kehilangan akses terhadap berbagai bentuk dukungan teknis dan pelatihan yang sebelumnya menjadi bagian penting dari hubungan bilateral. Namun, embargo tersebut juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok senjata tunggal dan memperluas kerjasama dengan mitra lainnya.

Perubahan besar kembali terjadi pada awal 2000-an ketika serangan 11 September 2001 mengubah prioritas keamanan AS secara drastis. Kepentingan AS terhadap upaya kontra-terorisme global membuat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan wilayah yang rentan terhadap aktivitas ekstremisme transnasional menjadi mitra strategis. Sejak 2005, pembatasan militer dicabut secara penuh dan berbagai program kerja sama kembali diaktifkan, termasuk IMET, latihan gabungan seperti *Garuda Shield*, *Cope West*, serta dialog pertahanan tingkat tinggi yang lebih terstruktur (Murphy, 2017). Pada fase ini, hubungan pertahanan kedua negara tidak hanya menekankan aspek tradisional seperti bantuan peralatan atau pelatihan, tetapi juga kolaborasi dalam penguatan institusi, peningkatan profesionalisme militer, dan reformasi sektor keamanan.

Memasuki dekade 2010-an hingga 2020-an, kerja sama militer Indonesia–AS mulai diarahkan pada isu-isu keamanan maritim yang semakin relevan seiring perubahan lanskap strategis Indo-Pasifik. Ketegangan di Laut Cina Selatan, perkembangan militerisasi di kawasan, serta meningkatnya aktivitas *gray-zone tactics* di sekitar jalur pelayaran internasional membuat kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas maritim. AS mulai memberikan dukungan berupa penguatan kapasitas *maritime domain awareness*, penyediaan perangkat pemantauan maritim, pelatihan operasi penjagaan laut, hingga kerja sama dalam peningkatan interoperabilitas antara TNI dan *US Indo-Pacific Command* (Sukma, 2020). Seiring waktu, aspek-aspek ini menjadi fondasi yang memperkuat hubungan kedua negara, sekaligus mempersiapkan dasar bagi intensifikasi kerja sama pada periode 2023.

Sejarah panjang yang penuh dinamika tersebut menunjukkan bahwa hubungan militer Indonesia dengan AS tidak pernah bersifat linear, melainkan selalu dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik, perubahan politik domestik, serta kebutuhan strategis kedua negara dalam merespons situasi regional. Oleh karena itu, perkembangan kerja sama keamanan maritim pada beberapa tahun terakhir dapat dipahami sebagai kelanjutan sekaligus evolusi dari hubungan yang telah terbentuk selama lebih dari tujuh dekade.

2.2 Kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat dalam Kerja Sama Pertahanan Militer di Sektor Maritim

Kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat dalam membangun kerja sama militer berangkat dari pertimbangan strategis masing-masing negara yang, meskipun berbeda konteks, memiliki titik temu dalam menjaga stabilitas kawasan. Bagi Indonesia, kerja sama pertahanan dengan AS tidak hanya dimaknai sebagai hubungan bilateral formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Indonesia menyadari bahwa sebagai negara kepulauan terbesar dan penjaga jalur pelayaran internasional, ancaman terhadap keamanan maritim mulai dari perompakan, penyelundupan, konflik batas maritim, hingga kehadiran kapal asing di zona ekonomi eksklusif menuntut kemampuan militer yang modern dan adaptif. Melalui kemitraan dengan AS, Indonesia memperoleh akses pada pelatihan teknis, peningkatan profesionalisme prajurit, pembaruan doktrin operasi, serta dukungan teknologi yang sukar diperoleh dari negara lain (Sukma, 2020). Selain itu, kerja sama ini juga membantu Indonesia mengisi

kesenjangan kapabilitas di sektor pertahanan, khususnya dalam pemantauan wilayah laut dan penegakan hukum maritim.

Di sisi lain, kepentingan Indonesia tidak hanya bersifat teknis-militer, tetapi juga berakar pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia berusaha menjaga hubungan seimbang dengan seluruh kekuatan besar, termasuk AS dan Tiongkok, tanpa terjebak dalam aliansi formal. Dengan merawat hubungan baik dengan Washington, Indonesia dapat menghindari ketergantungan pada satu mitra strategis dan mempertahankan ruang gerak diplomatik. Kerja sama pertahanan dengan AS juga memiliki dimensi simbolik, yakni memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor regional yang dihormati dan mampu memainkan peran penting dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik (Laksmana, 2018). Melalui latihan gabungan, dialog militer, dan kolaborasi maritim, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap stabilitas kawasan tanpa mengorbankan prinsip non-blok.

Sementara itu, bagi Amerika Serikat, kepentingan dalam menjalin kerja sama militer dengan Indonesia terkait erat dengan strategi jangka panjang AS di Indo-Pasifik. Washington memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki pengaruh signifikan di Asia Tenggara, baik karena letak geografisnya yang berada di jantung jalur pelayaran global maupun statusnya sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan. Kerja sama pertahanan dengan Indonesia memungkinkan AS mempertahankan kehadiran dan pengaruhnya dalam menghadapi tantangan geopolitik yang muncul, khususnya meningkatnya kompetisi dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik secara luas (Murphy, 2017). AS berkepentingan memperkuat kapasitas negara-negara

kawasan agar mampu menjaga kedaulatan maritim mereka, sekaligus menciptakan lingkungan strategis yang sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan navigasi, dan tatanan berbasis aturan (*rules-based order*).

Selain kepentingan geopolitik, AS juga melihat kerja sama militer dengan Indonesia sebagai sarana untuk memperluas interoperabilitas antara kedua militer. Latihan bersama, pendidikan militer, dan pertukaran informasi memungkinkan AS membangun hubungan yang lebih erat dengan angkatan bersenjata di kawasan, sehingga memperkuat jaringan pertahanan yang dapat diandalkan dalam menghadapi ancaman transnasional seperti terorisme, penyelundupan senjata, dan kejahatan maritim. Dalam konteks ini, Indonesia dipandang sebagai partner yang mampu berkontribusi signifikan karena memiliki pengalaman panjang dalam operasi penegakan hukum laut, kontra-terorisme, serta pengamanan wilayah perbatasan (Emmers, 2010).

Kepentingan kedua negara ini pada akhirnya bertemu pada kesadaran bahwa stabilitas Indo-Pasifik membutuhkan kolaborasi yang erat antara negara-negara yang berbagi kepentingan terhadap keamanan jalur maritim. Bagi Indonesia, kerja sama dengan AS menjadi peluang memperkuat kemampuan pertahanan nasional tanpa kehilangan otonomi strategis. Bagi AS, hubungan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan dan memastikan kawasan tetap terbuka dan stabil. Pertautan kepentingan inilah yang menjadi dasar penguatan kerja sama militer Indonesia–AS, khususnya dalam ranah keamanan maritim pada tahun-tahun terakhir.

2.3 Deskripsi *Defense Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia dan Amerika Serikat

Defense Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan kerangka kerja sama pertahanan yang dirancang untuk memperkuat hubungan bilateral melalui pengaturan yang lebih terstruktur, komprehensif, dan berjangka panjang. DCA berfungsi sebagai payung normatif yang mengkoordinasikan berbagai bentuk kerja sama militer yang sebelumnya berjalan secara sektoral, mencakup pelatihan dan pendidikan militer, pertukaran personel, peningkatan kapasitas institusi pertahanan, dukungan teknologi, serta pemanfaatan fasilitas tertentu untuk kegiatan non-tempur. Penting untuk dicatat bahwa DCA bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses dialog dan konsolidasi kepentingan yang berlangsung bertahap selama lebih dari satu dekade.

Gagasan awal mengenai perlunya pelebagaan kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat mulai mengemuka sejak pertengahan dekade 2010-an, seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan keamanan kawasan dan penguatan orientasi maritim dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014, visi *Poros Maritim Dunia* mendorong penempatan keamanan maritim sebagai prioritas strategis nasional, termasuk melalui pemanfaatan kerjasama pertahanan luar negeri. Dalam konteks ini, dialog pertahanan bilateral Indonesia–AS yang semakin intensif pada periode 2015–2020, baik melalui *Strategic Dialogue*, *Senior Officials’ Meeting*, maupun perluasan latihan gabungan, menjadi ruang awal pembahasan mengenai

kebutuhan akan kerangka kerjasama pertahanan yang lebih terlembaga (Laksmiana, 2018). Dengan demikian, ide DCA dapat dipahami sebagai hasil evolusi kebijakan, bukan sebagai satu peristiwa tunggal.

Salah satu aspek sentral yang kemudian dikristalkan dalam kerangka DCA adalah perluasan kerja sama di bidang pelatihan dan pendidikan militer. Program yang telah berjalan sebelumnya, seperti *International Military Education and Training* (IMET) dan latihan gabungan, dijadikan pondasi untuk membangun mekanisme kerja sama yang lebih sistematis. Dalam kerangka DCA, kerja sama ini diarahkan pada penempatan perwira penghubung, pertukaran instruktur, serta penyelarasan kurikulum pendidikan militer guna meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme. Bagi Indonesia, dimensi ini penting untuk mendukung adaptasi terhadap perkembangan strategi militer modern, khususnya dalam operasi gabungan, pengawasan maritim, dan penanganan ancaman non-tradisional.

Selain penguatan sumber daya manusia, DCA juga mencakup kerjasama peningkatan kapabilitas pertahanan melalui dukungan teknologi dan logistik. Amerika Serikat menawarkan dukungan dalam pengembangan *maritime domain awareness*, sistem pemantauan berbasis satelit, peningkatan kemampuan sensor dan radar, serta bantuan teknis dalam pemeliharaan alutsista. Aspek ini relevan bagi Indonesia mengingat masih adanya celah pengawasan di wilayah perairan strategis, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif, yang rentan terhadap pelanggaran kedaulatan, praktik *illegal fishing*, dan aktivitas kapal asing. Dalam kerangka

DCA, dukungan teknologi tersebut dirancang untuk memperkuat kemampuan nasional tanpa mengurangi kendali Indonesia atas sistem pertahanannya.

Di samping aspek teknis dan operasional, DCA juga mengatur mekanisme konsultasi kebijakan pertahanan melalui dialog strategis tingkat tinggi yang dilakukan secara berkala. Mekanisme ini bertujuan menjaga keselarasan kepentingan dan meningkatkan kepercayaan strategis kedua negara. Bagi Indonesia, forum konsultasi ini berfungsi sebagai instrumen kontrol politik agar kerja sama pertahanan tetap sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif dan tidak berkembang menjadi komitmen aliansi. Sementara bagi Amerika Serikat, dialog tersebut mendukung strategi Indo-Pasifik yang menekankan stabilitas kawasan, kebebasan navigasi, dan pengelolaan risiko konflik, khususnya di Laut Cina Selatan (Murphy, 2017).

Dalam tataran implementasi, DCA tetap dirancang untuk menghormati konstitusi dan hukum nasional masing-masing negara. Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa kerja sama pertahanan tidak boleh mengarah pada pendirian pangkalan militer asing atau kehadiran pasukan permanen. Oleh karena itu, mekanisme DCA difokuskan pada *capacity building* dan dukungan teknis, bukan integrasi komando militer. Fleksibilitas inilah yang menjadikan DCA dapat diterima secara politik sekaligus efektif secara operasional.

Secara keseluruhan, DCA dapat dipahami sebagai kerangka yang memodernisasi hubungan pertahanan Indonesia–Amerika Serikat melalui pendekatan yang lebih fungsional dan adaptif. Perjanjian ini merupakan artikulasi formal pada tahun 2023 dari proses panjang dialog dan kerja sama yang telah

dirintis sejak pertengahan 2010-an. Dalam konteks penelitian ini, DCA menjadi elemen penting untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kerja sama militer Indonesia–AS di bidang keamanan maritim memperoleh momentum baru pada 2023, seiring meningkatnya kebutuhan penguatan kapasitas pertahanan maritim nasional.

BAB 3

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH INDONESIA

DALAM MENJALIN KERJA SAMA PERTAHANAN MILITER

KHUSUSNYA DI SEKTOR MARITIM DENGAN AMERIKA SERIKAT

PADA TAHUN 2023

Bab ini membahas proses pengambilan keputusan kerja sama pertahanan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat di sektor maritim tahun 2023 dengan menggunakan *Decision-Making Theory* oleh Snyder. Analisis akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu setting internal yang mencakup faktor geografis, sosial, dan institusional dalam negeri, serta setting eksternal yang melibatkan dinamika regional, budaya antar negara, opini masyarakat internasional, dan kebijakan negara lain yang turut mempengaruhi arah kebijakan Indonesia.

3.1 Faktor Internal

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang Setting Internal, Setting internal mencerminkan kondisi domestik yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan suatu negara. Hal ini mencakup bagaimana masyarakat terorganisasi dan berfungsi, termasuk dalam hal opini publik, dinamika politik dalam negeri, posisi geografis negara, hingga kapasitas nasional yang dimiliki. Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor ini sangat relevan dalam membentuk respons kebijakan terhadap isu-isu keamanan maritim. Pentingnya setting internal semakin menonjol dalam sistem pemerintahan modern, terutama karena banyak negara, termasuk Indonesia, menganut sistem demokrasi yang memberi ruang besar bagi keterlibatan berbagai aktor domestik dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Mengacu pada teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Snyder, Bruck, dan Sapin (2002, hlm. 64), komponen setting internal dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu *non-human environment* (seperti kondisi geografis dan sumber daya alam), *society* (struktur sosial dan tekanan publik), dan *human environment* (aktor-aktor pembuat kebijakan dan institusi yang terlibat secara langsung). Ketiga komponen ini membentuk konteks internal yang menentukan arah dan bentuk kerja sama pertahanan Indonesia, termasuk dengan Amerika Serikat, dalam merespons ancaman terhadap kedaulatan maritim dan stabilitas kawasan.

3.1.1 Non-Human Environment

Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada pengaruh kondisi geografis, spasial, dan infrastruktur fisik domestik yang secara langsung membentuk kebutuhan strategis pertahanan Indonesia, khususnya dalam kerja sama militer di sektor maritim.

Kondisi geografis Indonesia merupakan faktor utama yang membentuk kebutuhan strategis pertahanan maritim nasional. Terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudra (Hindia dan Pasifik), Indonesia memiliki posisi silang dunia dengan luas laut sekitar 6,4 juta km² dan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (KKP 2023). Sekitar 40% jalur pelayaran global melewati wilayah perairan Indonesia, menjadikannya jalur strategis bagi perdagangan dunia. Namun, posisi geografis ini juga menghadirkan tantangan serius dalam hal keamanan. Pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, terutama di wilayah Laut Natuna Utara, menjadi ancaman rutin terhadap

kedaulatan Indonesia. Selain itu, perairan yang luas menyulitkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan perompakan laut. Risiko bencana alam seperti gempa dan tsunami yang kerap melanda wilayah pesisir juga menambah kompleksitas dalam menjaga kesiapsiagaan pertahanan. Dengan karakter geografis semacam ini, Indonesia memerlukan sistem pertahanan maritim yang berlapis, terintegrasi, dan memiliki kemampuan deteksi dini berbasis teknologi tinggi untuk menjaga kedaulatan laut secara efektif (Arsana 2020).

Sementara itu, dari sisi kondisi spasial, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan ruang pertahanan karena karakteristiknya sebagai negara kepulauan dengan 13 perbatasan laut dan darat bersama 10 negara tetangga, termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Persebaran wilayah yang luas menuntut penyebaran kekuatan militer yang proporsional di setiap kawasan strategis, terutama di titik-titik perbatasan dan jalur perdagangan utama seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Namun, hingga kini, persebaran kekuatan pertahanan Indonesia masih terpusat di bagian barat, seperti di Surabaya, Jakarta, dan Belawan, sementara wilayah timur seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara masih minim infrastruktur pertahanan laut. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pertahanan dan memperlemah kemampuan respon cepat terhadap potensi ancaman lintas batas. Selain itu, beberapa batas maritim seperti di Laut Timor dan Laut Sulawesi masih menyisakan sengketa yang berpotensi memicu ketegangan diplomatik. Oleh karena itu, pembangunan sistem pertahanan laut yang berbasis pada prinsip "*distributed maritime defense*", yakni pemerataan

kekuatan dan fasilitas pertahanan di seluruh wilayah nusantara, menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keamanan nasional secara menyeluruh.

Dari aspek infrastruktur fisik domestik, kesiapan pertahanan maritim Indonesia masih menghadapi keterbatasan signifikan, terutama dalam sistem pengawasan dan deteksi dini di wilayah laut yang luas dan tersebar. Keterbatasan ini bukan disebabkan oleh ketergantungan baru terhadap faktor eksternal, melainkan merupakan kondisi struktural yang telah ada sebelum kerja sama pertahanan diperkuat. Dalam konteks tersebut, kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dipersepsikan oleh Pemerintah Indonesia bukan sebagai bentuk peningkatan ketergantungan teknologi, melainkan sebagai instrumen percepatan peningkatan kapasitas nasional (*capacity-building mechanism*). Melalui pengembangan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS), kerja sama difokuskan pada alih pengetahuan, peningkatan interoperabilitas, dan pelatihan teknis yang memungkinkan Indonesia mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem pengawasan maritim secara mandiri dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, keterlibatan Amerika Serikat ditempatkan sebagai *enabler* untuk menutup kesenjangan kapabilitas awal, bukan sebagai substitusi permanen atas kemampuan nasional (Arsana 2020).

Ancaman-ancaman tersebut terbukti nyata. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang tahun 2023 terdapat 147 kasus illegal fishing yang melibatkan kapal asing, terutama di Laut Natuna Utara, Laut Arafura, dan Laut Sulawesi. Selain itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mencatat lebih dari 60 kasus penyelundupan narkoba dan sekitar 40 kasus

perdagangan manusia yang dilakukan melalui jalur laut Indonesia (KKP 2023). Kawasan Laut Natuna Utara, yang secara hukum merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, menjadi wilayah yang paling sering mendapat sorotan internasional karena kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal nelayan Tiongkok yang secara terbuka menentang kedaulatan wilayah laut Indonesia dan mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari “*Nine-Dash Line*” (Bakamla 2023).

Sistem pemantauan berbasis teknologi seperti *Maritime Domain Awareness* (MDA) juga belum terintegrasi secara penuh. Akibatnya, kemampuan deteksi dini terhadap pelanggaran wilayah atau ancaman laut lainnya menjadi terbatas. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan agresif negara lain, terutama di kawasan sensitif seperti Laut Cina Selatan. Keterbatasan ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk menjalin kerja sama pertahanan dengan negara-negara yang memiliki pengalaman, teknologi, dan kapasitas tinggi dalam bidang pertahanan laut. Dalam hal ini, Amerika Serikat menjadi mitra strategis yang dipilih karena mampu menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan akses ke sistem pertahanan maritim canggih (Yudhanto 2023).

Amerika Serikat menjadi mitra yang paling tepat bagi Indonesia dalam menjalin kerja sama pertahanan militer di bidang maritim karena kapasitasnya yang unggul dalam teknologi pertahanan laut, pengalaman global dalam menjaga keamanan jalur perdagangan internasional, serta komitmennya terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara dengan kekuatan angkatan laut terbesar di

dunia, Amerika Serikat memiliki kemampuan operasional yang komprehensif dalam bidang pengawasan maritim, pertahanan siber, dan sistem komunikasi militer modern seperti Link 16 serta *Maritime Domain Awareness* (MDA), yang sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia dalam memperkuat keamanan laut (U.S. Department of Defense 2024). Selain itu, Amerika Serikat secara konsisten mendorong kerja sama strategis melalui kebijakan *Indo-Pacific Partnership* yang sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sehingga kemitraan ini tidak bersifat subordinatif, melainkan kolaboratif. Kerja sama ini juga memperkuat posisi Indonesia di kawasan, karena selain menerima transfer pengetahuan dan teknologi, Indonesia memperoleh akses pada pelatihan, pendidikan militer, serta integrasi sistem pengawasan laut yang mendukung peningkatan kemampuan TNI Angkatan Laut. Dari sisi geopolitik, kemitraan dengan Amerika Serikat memberikan keseimbangan strategis terhadap pengaruh kekuatan besar lain seperti Tiongkok di Laut Cina Selatan, tanpa mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, kolaborasi pertahanan maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan langkah rasional dan strategis untuk memperkuat kemampuan nasional, menjaga kedaulatan, serta menjamin stabilitas keamanan kawasan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman maritim global. (Yudhanto 2023).

Analisis terhadap *non-human environment* dalam konteks kebijakan pertahanan Indonesia menunjukkan bahwa faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur bukan hanya menjadi latar belakang pasif, melainkan secara aktif membentuk urgensi pengambilan keputusan strategis. Indonesia menghadapi dilema strategis sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi geografis sangat

vital namun tidak diimbangi oleh kesiapan infrastruktur pertahanan yang memadai. Kesenjangan antara luas wilayah laut dan kapasitas pertahanan yang tersedia menciptakan apa yang disebut Snyder sebagai tekanan struktural yang harus ditanggapi oleh aktor pengambil kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia dalam bentuk kerja sama pertahanan dengan negara mitra seperti Amerika Serikat dapat dipahami sebagai upaya adaptif untuk menutup celah yang ditimbulkan oleh keterbatasan sumber daya fisik negara. Dalam teori pengambilan keputusan, realitas geografis seperti ini bukan hanya dianggap sebagai fakta objektif, tetapi juga sebagai konstruksi yang diberi makna oleh para pengambil keputusan, yang kemudian mendorong terbentuknya kebijakan berbasis kolaborasi internasional demi menjamin keamanan nasional secara menyeluruh.

3.1.2 Society

Pada bagian ini, pembahasan berfokus pada bagaimana struktur sosial, dinamika politik domestik, opini publik, serta persepsi masyarakat Indonesia secara keseluruhan mempengaruhi arah kebijakan luar negeri, khususnya dalam kerja sama pertahanan maritim dengan Amerika Serikat. Masyarakat sebagai bagian dari setting internal memainkan peran penting, baik secara langsung melalui tekanan terhadap elite politik, maupun secara tidak langsung melalui pembentukan persepsi kolektif tentang ancaman, keamanan, dan hubungan internasional. Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, opini publik tidak lagi hanya menjadi latar belakang pasif, melainkan turut membentuk legitimasi dan arah kebijakan pemerintah, termasuk di sektor pertahanan.

Dalam konteks kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat di sektor maritim, dinamika masyarakat sangat relevan, terutama dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah, kehadiran kapal asing di ZEE Indonesia, dan ketegangan yang terjadi di Laut Natuna Utara. Ketika kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan Tiongkok memasuki perairan yang diklaim sebagai ZEE Indonesia, berbagai elemen masyarakat mulai dari media, aktivis, hingga kelompok akademisi menunjukkan reaksi keras yang menuntut pemerintah bertindak lebih tegas. Pada tahun 2023 saja, Bakamla mencatat 59 kali pelanggaran oleh kapal asing di Laut Natuna Utara, sebagian besar melibatkan kapal dari Tiongkok (Bakamla 2023). Tekanan publik semakin menguat melalui pemberitaan media nasional dan pernyataan lembaga seperti DPR RI yang mendesak peningkatan pengamanan wilayah maritim.

Respon keras dari publik menegaskan adanya kekhawatiran kolektif terhadap lemahnya sistem pertahanan laut Indonesia serta meningkatnya kesadaran akan kebutuhan modernisasi militer. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada akhir 2023, sekitar 78% responden menyatakan dukungan terhadap peningkatan kerja sama militer Indonesia dengan negara-negara sahabat, selama kerja sama tersebut tidak melanggar prinsip non-blok dan kedaulatan nasional (LSI, 2023). Dalam kerangka Decision-Making Approach, data ini tidak dipahami sebagai penyebab langsung kebijakan, melainkan sebagai konteks opini publik yang dipersepsikan oleh para pengambil keputusan sebagai sumber legitimasi politik. Dukungan mayoritas masyarakat terhadap kerja sama dengan negara yang memiliki keunggulan teknologi pertahanan, seperti Amerika Serikat, membentuk persepsi elite bahwa opsi kerja

sama tersebut relatif dapat diterima secara domestik. Persepsi ini semakin menguat seiring dengan munculnya hasil konkret dari kerja sama pertahanan maritim, seperti peningkatan interoperabilitas dan modernisasi sistem komunikasi, yang kemudian dipersepsikan sebagai bukti rasionalitas kebijakan oleh para pembuat keputusan. Dengan demikian, opini publik berfungsi sebagai faktor lingkungan yang membingkai dan memperkuat preferensi kebijakan, bukan sebagai determinan tunggal atas keputusan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat.

Oleh sebab itu, penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat melalui kerangka *Defense Cooperation Agreement* (DCA) tidak terlepas dari respons kritis sebagian kalangan masyarakat. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pengamat kebijakan pertahanan menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam perumusan serta implementasi kerjasama pertahanan internasional. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan potensi minimnya keterlibatan publik dan pengawasan sipil dalam proses pengambilan keputusan strategis, sehingga kerja sama pertahanan berisiko dipersepsikan sebagai domain eksklusif elit militer dan birokrasi pertahanan. Dalam konteks DCA, kritik ini tidak serta-merta menolak kerja sama militer dengan Amerika Serikat, tetapi menekankan pentingnya memastikan bahwa perjanjian tersebut tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, tidak mengurangi kontrol sipil atas militer, serta selaras dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif. Dengan demikian, sikap kehati-hatian masyarakat sipil terhadap DCA lebih mencerminkan tuntutan akan tata kelola pertahanan yang

demokratis dan transparan, dibandingkan penolakan ideologis terhadap kerja sama pertahanan itu sendiri.

Struktur sosial-politik domestik Indonesia juga memiliki pengaruh kuat dalam membentuk arah kerja sama pertahanan. Aktor-aktor seperti Presiden, Kementerian Pertahanan, TNI AL, dan DPR memiliki keterkaitan langsung dengan dinamika masyarakat karena harus mempertimbangkan persepsi publik dalam setiap kebijakan strategis yang diambil. Misalnya, keputusan untuk memperluas kerjasama latihan militer gabungan dan peningkatan sistem pemantauan laut bukan semata keputusan teknis, melainkan juga merupakan respon terhadap ekspektasi publik agar Indonesia lebih tegas dan siap menghadapi ancaman di perairan nasional (Prasetyo 2022).

Kerja sama pertahanan juga berdampak terhadap relasi sipil-militer di dalam negeri. Keterlibatan masyarakat dalam memantau anggaran militer, mengevaluasi transparansi kerja sama luar negeri, serta menuntut keterbukaan informasi menjadi indikator berkembangnya budaya politik yang demokratis. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 mencatat peningkatan permintaan informasi publik terkait penggunaan anggaran kerja sama militer sebesar 34% dibanding tahun sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akuntabilitas sektor pertahanan (ICW 2023). Akibatnya, masyarakat bukan hanya objek perlindungan tetapi juga faktor penting dalam memastikan kebijakan nasional selaras dengan nilai-nilai nasional dan prinsip-prinsip demokrasi.

Analisis Keseluruhan menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya latar belakang sosial-politik yang pasif, tetapi lebih aktif berpartisipasi sebagai pengontrol, sekaligus sumber legitimasi terhadap pertahanan. Dalam konteks kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat, kebijakan publik tentang pengamanan maritim yang lemah dan tingkat intensitas pelanggaran dalam perencanaan strategis telah meningkatkan proses pengembangan praktik kerja serupa. Aspirasi masyarakat untuk mendukung perluasan kemampuan maritim, tetapi juga untuk kritis terhadap dominasi asing, menciptakan kebijakan yang mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang transparan, fleksibel, dan berdasarkan konsensus publik.

3.1.3 Human Environment

Pada bagian ini, pembahasan berfokus pada elemen manusia dan institusi yang secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan pertahanan negara, khususnya dalam konteks kerjasama maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat. Unsur ini mencakup tokoh-tokoh pemerintahan, pejabat militer, lembaga kementerian, serta kelompok-kelompok penasehat strategis yang memainkan peran utama dalam menyusun dan mengeksekusi kebijakan pertahanan luar negeri. *Human environment* berbeda dari masyarakat umum (*society*) karena unsur ini memiliki kewenangan struktural dan kapasitas pengaruh langsung terhadap kebijakan negara, termasuk dalam membangun kerja sama strategis dengan mitra internasional. Hubungan antar institusi dan individu elite politik serta cara mereka memproses informasi, merespons tekanan internal dan eksternal, serta menilai peluang dan risiko sangat menentukan arah akhir dari kebijakan pertahanan yang dijalankan pemerintah.

Dalam konteks kerja sama pertahanan maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat, keterlibatan *human environment* terlihat jelas melalui peran sentral Presiden Republik Indonesia sebagai pengambil keputusan tertinggi sekaligus pengarah awal kebijakan strategis. Gagasan pelebagaan kerja sama pertahanan yang kemudian berkembang dalam kerangka *Defense Cooperation Agreement* (DCA) tidak muncul secara tiba-tiba pada 2023, melainkan telah dirintis sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya sejak penguatan visi *Poros Maritim Dunia* dan intensifikasi dialog pertahanan bilateral Indonesia–Amerika Serikat pada periode 2015–2020. Arah kebijakan ini menempatkan keamanan maritim sebagai prioritas nasional dan mendorong pemanfaatan kerjasama pertahanan internasional untuk menutup kesenjangan kapasitas pengawasan laut. Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, antara lain pembangunan pangkalan militer baru di Natuna yang ditargetkan selesai pada 2024 serta pengadaan kapal patroli cepat untuk TNI Angkatan Laut guna memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan laut (Kemhan RI, 2023). Dalam kerangka tersebut, Presiden juga mendorong penguatan kerjasama pertahanan untuk meningkatkan pengawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang sepanjang 2023 mengalami peningkatan aktivitas pelanggaran oleh kapal asing, dengan 32 insiden tercatat oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla, 2024).

Kementerian Pertahanan memiliki fungsi teknis dan strategis dalam merumuskan prioritas kerja sama pertahanan luar negeri. Melalui Biro Kerja Sama Internasional, kementerian ini menganalisis kebutuhan alutsista dan peta ancaman nasional. Pada tahun 2023, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

telah lebih dahulu mengidentifikasi adanya kesenjangan serius dalam kemampuan pengawasan maritim nasional, khususnya di wilayah perairan timur dan selatan Indonesia. Berdasarkan evaluasi internal dan perencanaan pertahanan, Kemhan memproyeksikan kebutuhan penambahan sedikitnya 16 unit radar maritim serta 8 unit sistem komunikasi militer jarak jauh guna menutup titik-titik rawan pengawasan yang selama ini belum terintegrasi secara optimal (Kemhan, 2023). Sebelum adanya pelembagaan kerja sama dalam kerangka Defense Cooperation Agreement (DCA), respons Kemhan terhadap kebutuhan tersebut ditempuh melalui dua jalur utama, yakni perencanaan pengadaan nasional secara bertahap dan diplomasi pertahanan dengan mitra strategis. Dalam konteks diplomasi pertahanan inilah Kemhan secara aktif membawa kebutuhan teknis tersebut ke dalam forum dialog strategis dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya mencari dukungan peningkatan kapasitas (*capacity building*), terutama di bidang teknologi pemantauan dan sistem deteksi dini. Pendekatan ini mencerminkan strategi kehati-hatian Kemhan dalam merespons keterbatasan anggaran dan teknologi domestik, sekaligus menjaga prinsip kemandirian pertahanan. Hasil dari proses pra-DCA tersebut kemudian terefleksikan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada Oktober 2023, yang menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap modernisasi teknologi pertahanan Indonesia melalui hibah perangkat lunak sistem pemantauan laut dan pelatihan teknis, sebagai langkah awal menuju kerja sama yang lebih terlembaga.

Di tingkat operasional, TNI Angkatan Laut sebagai pelaksana kebijakan menjadi aktor kunci dalam mengimplementasikan kerja sama pertahanan maritim Indonesia–Amerika Serikat. Dalam struktur *human environment*, TNI AL tidak

hanya bertugas menjaga keamanan wilayah laut, tetapi juga berperan sebagai sumber masukan strategis berbasis pengalaman operasional kepada pemerintah, khususnya terkait kebutuhan pengawasan dan penegakan kedaulatan di laut. Berdasarkan data operasional TNI AL yang dirilis dalam laporan tahunan pertahanan, hingga akhir 2023 TNI AL telah mengerahkan lebih dari 60 kapal patroli aktif di wilayah rawan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Namun demikian, evaluasi internal menunjukkan bahwa keterbatasan integrasi antara sensor satelit, radar maritim, dan sistem komando masih menjadi kendala utama, sehingga mendorong TNI AL merekomendasikan penguatan kerjasama teknis dengan mitra asing. Rekomendasi tersebut kemudian direspons melalui peningkatan program pelatihan luar negeri, khususnya melalui *International Military Education and Training* (IMET). Berdasarkan laporan resmi Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sejak 2019 lebih dari 350 personel TNI AL telah mengikuti program IMET di Amerika Serikat, dengan fokus pelatihan pada sistem komunikasi militer, navigasi maritim, serta manajemen operasi laut terpadu (U.S. Department of Defense, 2023).

Selain pejabat eksekutif dan militer, lembaga pendukung seperti Kementerian Luar Negeri, Bakamla, dan BIN juga memainkan peran vital dalam pengambilan keputusan. Kemenlu memastikan agar kerja sama tidak melanggar prinsip bebas aktif. Pada 2023, Kemenlu mencatat peningkatan konsultasi diplomatik dengan negara-negara ASEAN dan Tiongkok terkait manuver maritim Indonesia, sebagai upaya meredam potensi ketegangan akibat kedekatan strategis dengan Amerika Serikat (Kemlu RI 2024). Bakamla sendiri berhasil melakukan 6 kali patroli gabungan dengan AS di Laut Sulawesi dan Laut Natuna Utara pada

2023 sebagai bagian dari inisiatif berbagi intelijen dan interoperabilitas sistem pengawasan. BIN, dalam laporan tahunannya, juga menyatakan bahwa ancaman terhadap jalur perdagangan laut Indonesia meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama akibat manuver kapal asing dan potensi penyelundupan senjata (BIN 2023). Ancaman yang dimaksud mencakup beberapa bentuk, antara lain pelanggaran wilayah oleh kapal asing, terutama di wilayah Laut Natuna Utara yang kerap dimasuki kapal penjaga pantai dan kapal nelayan milik negara lain, aktivitas penyelundupan senjata dan narkoba yang memanfaatkan jalur laut sebagai akses utama, hingga meningkatnya risiko konflik terbuka akibat kehadiran kekuatan militer asing di perairan strategis Indonesia.

Komunikasi dan koordinasi antar elemen *human environment* ini menentukan efektivitas kerja sama pertahanan luar negeri. Dalam beberapa rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, sempat terjadi perbedaan pandangan mengenai intensitas kerja sama dengan Amerika, khususnya terkait kekhawatiran intervensi strategis AS terhadap kebijakan pertahanan dalam negeri. Namun, pendekatan multi stakeholder yang diambil oleh pemerintah mendorong lahirnya kebijakan yang lebih seimbang, seperti penolakan terhadap permintaan AS untuk melakukan pengawasan langsung di pangkalan-pangkalan militer Indonesia, namun tetap menerima bantuan teknis berbasis data dan pelatihan.

Dalam proses perumusan kebijakan kerja sama pertahanan maritim dengan Amerika Serikat, interaksi antar aktor pembuat keputusan tidak berlangsung secara linier maupun sepenuhnya harmonis, melainkan melalui dinamika diskusi dan perbedaan pandangan di antara institusi terkait. Presiden sebagai pengambil

keputusan tertinggi berperan sebagai penentu arah strategis, namun formulasi kebijakan dijalankan melalui proses deliberasi yang melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta unsur militer, khususnya TNI Angkatan Laut. Kementerian Pertahanan dan TNI AL pada umumnya menekankan urgensi kerja sama dari aspek teknis dan operasional, terutama untuk menutup kesenjangan kemampuan pengawasan laut, meningkatkan interoperabilitas, serta mempercepat modernisasi sistem pertahanan maritim. Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri menunjukkan pendekatan yang lebih berhati-hati dengan menyoroti implikasi politik luar negeri, terutama terkait konsistensi prinsip bebas aktif dan potensi persepsi internasional bahwa Indonesia condong pada salah satu kekuatan besar. Perbedaan sudut pandang ini mendorong terjadinya proses negosiasi kebijakan di tingkat elite, di mana setiap aktor membawa kepentingan dan persepsi institusional masing-masing. Hasil dari proses tersebut tercermin dalam desain Defense Cooperation Agreement (DCA) yang bersifat terbatas, tidak membentuk aliansi militer, serta lebih menekankan pada peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan kerja sama teknis (Laksmana 2018).

Analisis terhadap keseluruhan struktur ini menunjukkan bahwa *human environment* menjadi pendorong utama sekaligus pengendali arah kerja sama pertahanan Indonesia-AS. Keterlibatan langsung elite nasional memungkinkan penyusunan kebijakan yang cepat dan responsif terhadap ancaman regional. Namun, keberhasilan kerjasama ini tetap bergantung pada koordinasi antar lembaga, transparansi proses, dan kejelasan batasan diplomatik agar tidak mengganggu prinsip kedaulatan dan non-blok Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setting internal memegang peranan krusial dalam membentuk arah kebijakan pertahanan Indonesia, khususnya dalam kerja sama strategis dengan Amerika Serikat pada sektor maritim. Faktor non-human environment seperti kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta luasnya wilayah laut yang harus dijaga menjadi pendorong utama bagi pemerintah untuk mencari mitra dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan. Di sisi lain, tekanan dari masyarakat yang menuntut perlindungan wilayah kedaulatan serta sikap publik terhadap ancaman eksternal telah membentuk legitimasi politik bagi penguatan kerja sama internasional. Sementara itu, peran aktor-aktor utama dalam human environment termasuk Presiden, Kementerian Pertahanan, TNI AL, dan lembaga pendukung lainnya menjadi penentu dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang responsif terhadap tantangan domestik dan kebutuhan strategis nasional. Sinergi antara ketiga elemen internal ini memperlihatkan bahwa keputusan Indonesia untuk menjalin dan mempererat kerja sama pertahanan maritim dengan Amerika Serikat tidak lahir secara spontan, tetapi merupakan hasil dari perhitungan strategis berdasarkan kondisi objektif di dalam negeri. Keputusan ini sekaligus mencerminkan bagaimana dinamika internal sebuah negara mampu mendorong terbentuknya kemitraan global dalam menjawab tantangan keamanan kontemporer

3.2 Faktor *Social Structure and Behaviour*

Social structure and behaviour merujuk pada konfigurasi struktur sosial-politik domestik serta pola perilaku kebijakan yang berkembang di dalam suatu negara dan memengaruhi cara pemerintah merumuskan serta menjalankan

kebijakan luar negeri. Dalam konteks pengambilan kebijakan pertahanan, aspek ini berperan penting karena keputusan negara tidak hanya ditentukan oleh tekanan eksternal atau kepentingan strategis semata, tetapi juga oleh nilai-nilai yang dianut, pola kelembagaan yang berlaku, serta kebiasaan pengambilan keputusan yang telah terlembaga dalam sistem politik nasional. Dengan demikian, respons suatu negara terhadap dinamika keamanan internasional termasuk pilihan untuk menjalin kerja sama militer merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh struktur sosial-politik dan perilaku aktor-aktor pembuat kebijakan (Sebastian 2018). Dalam kasus Indonesia, struktur dan pola perilaku kebijakan luar negeri yang menekankan prinsip bebas aktif, kedaulatan nasional, dan kehati-hatian terhadap aliansi militer membentuk kerangka bagaimana Pemerintah Indonesia merespons dinamika kawasan Indo-Pasifik dan menjalin kerja sama militer di sektor maritim dengan Amerika Serikat pada tahun 2023.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama militer, khususnya di sektor maritim dengan Amerika Serikat pada tahun 2023, tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial-politik dan pola perilaku kebijakan luar negeri yang telah berkembang dalam sistem politik Indonesia. Struktur dan pola perilaku tersebut membentuk cara pemerintah menafsirkan kerja sama militer internasional, menentukan batasan-batasan yang dapat diterima, serta memilih bentuk kerja sama yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan nasional.

Dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, terdapat orientasi nilai yang relatif konsisten yang mempengaruhi arah kerja sama militer dengan negara lain. Prinsip politik luar negeri bebas aktif, penekanan pada kedaulatan nasional,

serta kehati-hatian terhadap keterikatan militer jangka panjang dengan kekuatan besar telah menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan pertahanan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang membatasi bentuk kerja sama militer Indonesia dengan Amerika Serikat, sehingga kerja sama yang dibangun pada tahun 2023 diarahkan pada peningkatan kapasitas maritim tanpa mengarah pada pembentukan aliansi militer formal (Anwar, 2010; Weatherbee, 2013).

Struktur kelembagaan pertahanan Indonesia juga berperan penting dalam membentuk kebijakan kerja sama militer di sektor maritim. Pengambilan keputusan strategis di bidang pertahanan berada di bawah dominasi eksekutif, khususnya Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi, dengan peran sentral Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam konteks kerja sama dengan Amerika Serikat, struktur ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk mengendalikan arah dan ruang lingkup kerja sama secara ketat, sehingga tetap sejalan dengan kepentingan pertahanan nasional dan tidak menimbulkan ketergantungan strategis. Pola pengambilan keputusan yang terpusat dan berbasis pertimbangan profesional-militer ini turut menjelaskan mengapa kerja sama maritim tahun 2023 lebih menekankan aspek pelatihan, peningkatan *interoperabilitas*, dan penguatan kemampuan pengawasan laut (Laksmna, 2021).

Selain itu, pembagian peran antar institusi negara mencerminkan pola perilaku kebijakan yang telah terlembaga dalam pengelolaan kerja sama militer internasional. Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut berperan dominan dalam merumuskan kebutuhan teknis dan operasional kerja sama maritim, seperti

peningkatan kemampuan patroli, latihan bersama, dan pertukaran informasi keamanan laut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa kerja sama militer dengan Amerika Serikat tetap berada dalam koridor diplomasi Indonesia dan tidak bertentangan dengan komitmen regional maupun posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Pola koordinasi ini menunjukkan adanya spesialisasi peran yang menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan kebijakan luar negeri (Sukma, 2014)

Dinamika sosial dan politik domestik juga turut mempengaruhi perilaku pemerintah dalam menjalin kerja sama militer dengan Amerika Serikat. Kehati-hatian terhadap persepsi publik mengenai kehadiran kekuatan asing, serta pengawasan politik oleh DPR dan perhatian kalangan akademisi terhadap isu kedaulatan dan non-blok, membentuk batasan politik yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, kerja sama militer di sektor maritim pada tahun 2023 dirancang sedemikian rupa agar dapat diterima secara domestik, dengan menekankan bahwa kerja sama tersebut bersifat *defensif*, berorientasi pada peningkatan kapasitas nasional, dan tidak mengubah orientasi dasar kebijakan luar negeri Indonesia (Sukma, 2014).

Dengan demikian, struktur sosial-politik dan pola perilaku kebijakan luar negeri Indonesia menjelaskan mengapa Pemerintah Indonesia memilih bentuk kerja sama militer maritim yang bersifat selektif dan terbatas dengan Amerika Serikat pada tahun 2023. Kerja sama tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk merespons tantangan keamanan maritim dan dinamika kawasan Indo-Pasifik, sekaligus mempertahankan otonomi strategis dan konsistensi

kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, kerja sama militer maritim Indonesia–Amerika Serikat dapat dipahami sebagai hasil dari proses kebijakan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mengakar, struktur kelembagaan pertahanan, serta dinamika sosial-politik domestik yang membentuk perilaku pengambil keputusan.

3.3 Faktor Eksternal

Setting eksternal merujuk pada kondisi di luar batas wilayah suatu negara yang mencakup aksi dan reaksi dari negara lain yang berpotensi mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dalam konteks hubungan internasional, setting eksternal memiliki peran yang setara pentingnya dengan setting internal, karena lingkungan internasional secara langsung mempengaruhi bagaimana sebuah negara merespons tantangan dan peluang yang muncul. Interaksi antarnegara tidak terjadi dalam ruang hampa; keputusan yang diambil oleh satu negara seringkali memicu respons kebijakan dari negara lain. Fenomena ini terlihat nyata dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik, dimana kebijakan pertahanan negara besar seperti Amerika Serikat dapat mendorong negara mitra seperti Indonesia untuk menyesuaikan strategi militernya, termasuk melalui kerja sama bilateral. Mengacu pada kerangka teori Snyder, Bruck, dan Sapin (2002, hlm. 64), setting eksternal mencakup empat elemen penting, yaitu *non-human environment* (seperti geografi politik kawasan), *other cultures* (nilai dan norma negara lain), *other societies* (struktur sosial negara-negara mitra atau pesaing), dan *societies organized and functioning as states and government action* (kebijakan luar negeri negara-negara lain yang berdampak secara langsung). Dalam kasus Indonesia, perubahan

kebijakan pertahanan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam menghadapi Tiongkok, menjadi bagian dari setting eksternal yang turut mendorong pembentukan kerja sama pertahanan maritim demi memperkuat kedaulatan dan posisi strategis Indonesia di kawasan.

3.3.1 Non-Human Environment

Non-human environment merupakan faktor eksternal yang bersifat objektif dan tidak melibatkan aktor manusia secara langsung, namun tetap memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor ini mencakup kondisi fisik dan geografis kawasan, dinamika lingkungan regional, serta konfigurasi spasial sistem internasional yang membentuk tekanan atau peluang terhadap suatu negara. Dalam konteks kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat, *non-human environment* menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi arah kebijakan pertahanan Indonesia, terutama dalam sektor maritim.

Secara geografis, Indonesia terletak di pusat kawasan Indo-Pasifik yang merupakan wilayah strategis bagi arus perdagangan global, komunikasi laut internasional (Sea Lines of Communication/SLOC), dan konektivitas lintas benua. Jalur pelayaran utama dunia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok melintasi wilayah perairan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pintu gerbang penting dalam sistem logistik internasional. Namun, posisi strategis ini juga membawa konsekuensi keamanan yang signifikan. Wilayah perairan Indonesia sangat rentan terhadap berbagai tantangan seperti penyelundupan

narkotika, perompakan, perdagangan manusia, pelanggaran wilayah, hingga aksi terorisme lintas negara (Yudhanto 2023).

Salah satu contoh nyata tekanan eksternal yang berasal dari kondisi fisik kawasan adalah konflik di Laut Cina Selatan. Meskipun Indonesia bukan negara yang terlibat langsung dalam sengketa teritorial, aktivitas kapal nelayan asing dan kapal penjaga pantai Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara telah memicu ketegangan dan reaksi keras dari berbagai pihak di dalam negeri. Kehadiran kapal asing di wilayah yang secara hukum diakui sebagai milik Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 menunjukkan bahwa tekanan eksternal bukan hanya bersifat diplomatik, tetapi juga faktual dan kasat mata di lapangan. Situasi ini mendorong Indonesia untuk memperkuat kemampuan pertahanan lautnya melalui berbagai pendekatan, termasuk menjalin kemitraan strategis dengan Amerika Serikat (Santosa 2023).

Selain ancaman dari aspek keamanan, lingkungan maritim Indonesia juga dihadapkan pada kondisi fisik yang menyulitkan dari segi pengawasan dan logistik. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai lebih dari 81.000 km, membuat pengawasan laut menjadi tantangan tersendiri. Infrastruktur pertahanan di wilayah-wilayah perbatasan masih terbatas, dan sistem pengawasan laut berbasis radar dan satelit belum mencakup seluruh wilayah secara optimal. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan pertahanan nasional dengan kapasitas aktual negara. Oleh karena itu, kerja sama pertahanan dengan negara yang memiliki keunggulan

teknologi seperti Amerika Serikat dipandang sebagai solusi realistis untuk mengatasi hambatan struktural tersebut (Indirasari 2022).

Lingkungan fisik eksternal juga mencakup kerentanan terhadap bencana alam. Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik yang menjadikannya salah satu negara paling rawan terhadap gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Kondisi ini menambah kerumitan dalam menjaga stabilitas maritim, karena infrastruktur pelabuhan, jalur logistik, dan operasi militer dapat terganggu sewaktu-waktu oleh bencana. Untuk menghadapi tantangan ini, kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat juga mencakup peningkatan kapasitas tanggap darurat maritim, pelatihan penyelamatan, serta pemulihan pasca bencana melalui operasi kemanusiaan bersama (Rizaldi & Fahmi 2022).

Dalam merespons tekanan dan tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks, Indonesia membangun kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai strategi untuk memperkuat kemampuan nasional dalam menjaga kedaulatan wilayah laut. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pelatihan militer bersama yang berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dan taktis personel, hingga transfer teknologi dalam bidang pengawasan dan komunikasi maritim. Dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat turut membantu Indonesia dalam meningkatkan cakupan deteksi dan pengawasan wilayah laut, memperkuat sistem komando dan kontrol militer di perairan strategis, serta mengembangkan infrastruktur logistik pertahanan yang sebelumnya terbatas. Kolaborasi ini pada dasarnya menjadi bagian dari upaya jangka panjang Indonesia dalam memperkuat pertahanan maritim di tengah

keterbatasan sumber daya domestik dan meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik (Widjajanti 2023).

Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor lingkungan non-human dalam konteks kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kondisi geografis dan lingkungan fisik suatu wilayah bukan hanya latar belakang yang tidak aktif, tetapi juga elemen yang menciptakan tekanan strategis langsung terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Lokasi Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional utama sekaligus berbatasan langsung dengan area konflik seperti Laut Cina Selatan menjadikannya berada dalam posisi yang rentan tetapi juga strategis. Ancaman yang nyata, seperti pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, penyelundupan lintas negara, serta rentan terhadap bencana alam, menunjukkan bahwa lingkungan fisik secara objektif mendorong negara untuk membangun respons pertahanan yang bisa beradaptasi. Dalam hal ini, kerja sama dengan Amerika Serikat dapat dianggap sebagai bentuk respons terhadap ketidakseimbangan antara posisi strategis Indonesia dan keterbatasan kapasitas pertahanan dalam negeri, di mana teknologi, logistik, dan dukungan militer dari luar negeri diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dengan demikian, lingkungan non-human bukan hanya menjadi penyebab munculnya kebijakan, tetapi juga membentuk arah dan urgensi dari kerja sama strategis yang dilakukan Indonesia di bidang pertahanan maritim.

3.3.2 Other Cultures

Dalam kerangka Foreign Policy Decision-Making yang dikemukakan oleh Richard C. Snyder, *other cultures* merujuk pada perbedaan nilai, ideologi, simbol,

etika, dan praktik sosial yang dianut oleh negara lain dan memengaruhi cara mereka membentuk kebijakan luar negeri serta strategi pertahanannya. Dalam konteks kerja sama pertahanan maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat, perbedaan budaya strategis ini menjadi faktor eksternal yang signifikan dan perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan miscalculasi maupun resistensi politik. Indonesia secara normatif berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tradisi non-blok, yang menekankan kedaulatan, otonomi strategis, serta penolakan terhadap keterikatan aliansi militer formal. Nilai ini berbeda dengan Amerika Serikat yang secara konsisten mengedepankan *rules-based international order*, kebebasan navigasi, dan strategi *deterrence* sebagai fondasi utama kebijakan keamanannya di kawasan Indo-Pasifik. Perbedaan nilai dan ideologi tersebut tercermin dalam perumusan Defense Cooperation Arrangement (DCA), di mana Indonesia menekankan kerja sama berbasis peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan penegakan hukum maritim, sementara Amerika Serikat melihat kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan dan menyeimbangkan pengaruh kekuatan besar lain di Laut Cina Selatan (Gunawan 2020).

Selain perbedaan nilai dan ideologi, aspek simbol dan bahasa politik juga mencerminkan perbedaan budaya strategis kedua negara. Indonesia secara konsisten menggunakan narasi kedaulatan nasional, Zona Ekonomi Eksklusif, dan keamanan maritim domestik dalam merespons dinamika di Laut Natuna Utara, serta menghindari penyematan isu tersebut secara langsung ke dalam konflik Laut Cina Selatan. Sebaliknya, Amerika Serikat secara terbuka mengaitkan wilayah tersebut dengan dinamika regional Laut Cina Selatan dan menggunakan simbol

kebijakan seperti *freedom of navigation* dan *Indo-Pacific stability* dalam pernyataan resminya. Perbedaan simbolik ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara merespons ancaman yang sama, kerangka makna yang digunakan berbeda sesuai dengan budaya strategis masing-masing (Nurchahyo 2019). Di sisi lain, perbedaan etika penggunaan kekuatan juga tampak jelas, di mana Indonesia menempatkan kekuatan militer sebagai instrumen defensif dan reaktif yang berlandaskan hukum internasional, sementara Amerika Serikat menerapkan pendekatan *forward presence* melalui operasi *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs), yang tidak diadopsi oleh Indonesia.

Faktor budaya sosial dan praktik institusional turut memperkuat perbedaan tersebut. Sebagai negara dengan pengalaman kolonial dan masyarakat yang sensitif terhadap kehadiran militer asing, Indonesia harus mempertimbangkan persepsi publik dan legitimasi domestik dalam setiap bentuk kerja sama pertahanan. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki budaya politik keamanan yang lebih terbuka terhadap proyeksi kekuatan militer global. Perbedaan budaya birokrasi juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan, di mana Indonesia mengedepankan mekanisme konsultatif lintas lembaga melibatkan Presiden, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI, dan DPR sementara sistem pertahanan Amerika Serikat relatif lebih cepat dan terdesentralisasi melalui Departemen Pertahanan dan USINDOPACOM (Wicaksana 2020). Oleh karena itu, *other cultures* dalam kerja sama pertahanan maritim Indonesia–Amerika Serikat tidak hanya menjadi tantangan eksternal, tetapi juga membentuk desain kebijakan DCA yang bersifat fleksibel, non-aliansi,

dan disesuaikan dengan budaya strategis Indonesia agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki akar budaya pertahanan dan politik luar negeri yang sangat berbeda. Indonesia mengedepankan prinsip bebas aktif yang mengutamakan kemandirian strategis dan penolakan terhadap keterlibatan dalam blok kekuatan global. Sebaliknya, Amerika Serikat menganut kebijakan luar negeri yang lebih intervensionis dan hegemonik, dengan strategi keamanan yang menekankan kepemimpinan global dan keterlibatan militer secara aktif di berbagai kawasan. Perbedaan ini tercermin dalam pendekatan kerja sama: Indonesia cenderung membangun kemitraan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, sedangkan Amerika Serikat sering mengusulkan pola kemitraan berbasis interoperabilitas dan integrasi strategis yang lebih dalam (Sukma 2020).

Aspek lain dari perbedaan budaya adalah dalam hal struktur militer dan praktik kelembagaan. Indonesia memiliki kultur militer yang cenderung hirarkis dan birokratis, dengan komando terpusat, sedangkan Amerika Serikat menerapkan prinsip fleksibilitas operasi dan desentralisasi wewenang di medan tugas. Perbedaan ini kadang menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan latihan bersama, terutama dalam pengambilan keputusan lapangan, manajemen komunikasi, dan penggunaan perangkat teknologi pertahanan. Latihan gabungan seperti *CARAT* dan *Super Garuda Shield* menjadi medium penting dalam proses adaptasi dan harmonisasi kedua budaya militer tersebut (Fitriyani & Hamzah 2021).

Di luar aspek militer, budaya politik dalam hal transparansi, akses informasi, dan peran masyarakat sipil juga menunjukkan kontras. Amerika Serikat terbiasa dengan proses penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dan pengawasan legislatif secara intensif, sedangkan di Indonesia, isu pertahanan masih dianggap sebagai domain eksklusif elite eksekutif dan militer. Hal ini berpengaruh terhadap ekspektasi dalam kerja sama; Amerika Serikat cenderung mendorong keterbukaan data, pertukaran informasi sensitif, dan evaluasi berbasis indikator terbuka, sedangkan Indonesia lebih berhati-hati dalam membuka akses terhadap proses internal kebijakan (Anwar 2021).

Namun demikian, adanya nilai-nilai bersama seperti keinginan untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, mendukung supremasi hukum laut internasional, dan menolak ekspansi kekuatan secara sepihak menjadi titik temu budaya strategis yang menguatkan dasar kerja sama ini. Melalui program seperti *IMET* (International Military Education and Training), personel militer Indonesia mendapatkan pemahaman langsung terhadap sistem pertahanan dan nilai-nilai profesionalisme militer Amerika Serikat, yang kemudian menjadi jembatan untuk memperkuat integrasi budaya strategis dalam jangka panjang (Latifah & Hendrawan 2022).

Analisis terhadap faktor *other cultures* dalam setting eksternal menunjukkan bahwa perbedaan budaya strategis dan politik berpengaruh signifikan terhadap dinamika kerja sama pertahanan antarnegara. Dalam hubungan Indonesia–Amerika Serikat, perbedaan pandangan mengenai kedaulatan, gaya kepemimpinan militer, dan tingkat keterbukaan kebijakan kerap

menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan dan menyelaraskan ekspektasi. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan cenderung berhati-hati terhadap dominasi kekuatan besar seringkali berhadapan dengan pendekatan Amerika Serikat yang lebih proaktif dalam membangun kemitraan strategis. Perbedaan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin dalam praktik kerja sama, seperti pola pengambilan keputusan, pertukaran informasi, dan penggunaan teknologi pertahanan. Oleh karena itu, kerja sama pertahanan perlu dipahami sebagai proses adaptasi lintas budaya yang menentukan keberlanjutan kemitraan dalam jangka panjang.

3.3.3 *Other Societies*

Other societies merupakan elemen eksternal yang mencakup struktur sosial, pandangan masyarakat, tekanan politik domestik, dan orientasi publik dari negara-negara lain yang berinteraksi atau memiliki kepentingan dalam kerja sama internasional. Dalam konteks kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat, dinamika masyarakat di kedua negara serta di lingkungan regional memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan, arah, dan legitimasi kebijakan yang diambil oleh para pengambil keputusan.

Di Amerika Serikat, opini publik dan dinamika politik domestik membentuk karakter *other society* yang dipersepsikan relatif stabil dan kompatibel dengan kepentingan strategis Indonesia. Dalam konteks kebijakan luar negeri AS, terdapat konsensus lintas partai yang kuat mengenai pentingnya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, kebebasan navigasi, dan keamanan jalur perdagangan internasional. Konsensus ini tercermin dalam dukungan

berkelanjutan terhadap kerja sama pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terlepas dari pergantian pemerintahan di Washington. Bagi para pengambil keputusan Indonesia, kondisi tersebut menciptakan persepsi bahwa kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat memiliki tingkat keberlanjutan (*policy continuity*) yang tinggi dan tidak bergantung pada kepentingan politik jangka pendek. Selain itu, opini publik dan elite strategis Amerika Serikat cenderung memandang Indonesia sebagai mitra penting, bukan sebagai objek dominasi atau aliansi formal, sehingga membuka ruang kerja sama yang bersifat *capacity building* tanpa tuntutan subordinasi politik. Dalam kerangka Snyder, persepsi terhadap masyarakat dan sistem politik Amerika Serikat sebagai *other society* yang relatif transparan, terprediksi, dan mendukung tatanan maritim berbasis aturan (*rules-based order*) menjadi faktor penting yang mendorong Indonesia memandang Amerika Serikat sebagai mitra pertahanan maritim yang lebih rasional dibandingkan negara lain seperti Tiongkok atau Rusia (Scott 2022).

Sementara itu, masyarakat di negara-negara Asia Tenggara, termasuk di ASEAN, turut menjadi penentu atmosfer kerjasama pertahanan regional. Beberapa negara seperti Filipina dan Vietnam juga menjalin kerja sama erat dengan Amerika Serikat, namun memiliki dinamika domestik yang lebih terbuka terhadap pengaruh militer asing. Sebaliknya, di Indonesia, sensitivitas terhadap kedaulatan nasional dan trauma sejarah masa lalu (misalnya era kolonialisme dan intervensi asing) membuat masyarakat lebih waspada terhadap kerja sama militer yang bersifat terlalu dalam. Ini tercermin dari diskursus publik dan media yang

cenderung menekankan kedaulatan, netralitas, dan prinsip bebas aktif, terutama ketika Indonesia menjalin hubungan erat dengan negara adidaya (Fatimah 2023).

Respons masyarakat Indonesia terhadap kerja sama pertahanan juga dipengaruhi oleh narasi yang berkembang di media serta diskursus yang dibangun oleh organisasi masyarakat sipil dan komunitas akademik. Ketika kerja sama Indonesia–Amerika Serikat dikaitkan dengan peningkatan kapasitas TNI Angkatan Laut, modernisasi teknologi pertahanan maritim, dan penguatan pengawasan wilayah kedaulatan seperti di Laut Natuna Utara, respons publik cenderung positif karena dipersepsikan sebagai upaya proteksi kepentingan nasional. Namun, apabila kerja sama tersebut dipahami sebagai bentuk kedekatan berlebihan dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, kritik dari masyarakat sipil mulai mengemuka karena dianggap berpotensi mengganggu prinsip netralitas dan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia (Rahman & Prasetyo, 2023). Dalam konteks konstelasi aktor eksternal, persepsi publik ini turut membedakan Amerika Serikat dari aktor lain seperti Tiongkok dan Rusia. Tiongkok, meskipun merupakan mitra ekonomi penting, dipersepsikan oleh masyarakat Indonesia sebagai sumber tekanan keamanan maritim akibat aktivitasnya di Laut Natuna Utara, sehingga kerja sama pertahanan dengannya berpotensi menimbulkan resistensi publik. Sementara itu, Rusia dipandang memiliki keterbatasan relevansi operasional di kawasan Indo-Pasifik serta minim keterlibatan dalam isu keamanan maritim Asia Tenggara. Oleh karena itu, Amerika Serikat dipersepsikan sebagai mitra yang relatif lebih dapat diterima secara sosial dan politik, karena kerja samanya dikonstruksikan dalam kerangka peningkatan kapasitas pertahanan, bukan aliansi militer formal.

Di luar dinamika masyarakat domestik, Indonesia juga harus mempertimbangkan persepsi masyarakat dan elite politik di negara-negara tetangga, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dipilih karena memiliki fleksibilitas politik yang lebih tinggi dan tidak mengharuskan Indonesia masuk ke dalam blok militer tertentu. Berbeda dengan kerja sama pertahanan yang terlalu dekat dengan Tiongkok yang berpotensi memicu kecurigaan negara-negara ASEAN lain akibat sengketa Laut Cina Selatan kemitraan dengan Amerika Serikat masih dapat direpresentasikan sebagai kerja sama fungsional dan terbatas pada peningkatan kapasitas maritim. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjaga keseimbangan hubungan eksternal serta meminimalkan kekhawatiran regional terhadap pergeseran orientasi strategis Indonesia (Putra, 2022). Dengan demikian, dalam perspektif *other societies* ala Snyder, Amerika Serikat dipersepsikan sebagai aktor eksternal yang paling kompatibel secara sosial, politik, dan regional dibandingkan Tiongkok maupun Rusia.

Di tingkat global, masyarakat internasional, termasuk lembaga swadaya masyarakat internasional dan komunitas akademik, juga turut memantau bentuk kerja sama militer antara negara-negara berkembang dengan kekuatan besar. Isu-isu seperti penggunaan bantuan militer, pelatihan pasukan, serta operasi gabungan yang menyentuh wilayah rawan HAM sering kali menjadi sorotan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan masyarakat internasional terhadap kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat, terutama dalam menjaga agar kemitraan ini tidak melanggar prinsip-prinsip

hukum internasional dan tidak digunakan untuk menekan kelompok atau komunitas tertentu di dalam negeri (Cohen & Jennings 2021).

Analisis faktor *other societies* menunjukkan bahwa aktor sosial memiliki peran penting dalam membentuk arah dan keberlanjutan kebijakan pertahanan. Dalam kerja sama Indonesia–Amerika Serikat, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh elite dan institusi militer, tetapi juga oleh tingkat penerimaan publik. Di Amerika Serikat, masyarakat sipil, media, dan legislatif berperan aktif mempengaruhi kebijakan luar negeri, khususnya terkait isu HAM dan akuntabilitas anggaran pertahanan. Sementara itu, di Indonesia, sensitivitas historis terhadap campur tangan asing mempengaruhi persepsi publik terhadap kerja sama pertahanan, apakah dipandang sebagai penguatan kedaulatan atau ancaman terhadap prinsip bebas aktif. Oleh karena itu, dimensi sosial menjadi faktor aktif yang perlu dikelola melalui transparansi, komunikasi publik, dan konsistensi kebijakan dengan identitas nasional Indonesia.

3.3.4 Societies Organized and Functioning as States and Government Action

Societies organized and functioning as states and government action merupakan elemen penting dalam setting eksternal yang merujuk pada tindakan, kebijakan, dan strategi dari negara-negara lain yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku dan keputusan politik luar negeri suatu negara. Dalam konteks kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat, faktor ini terlihat jelas dalam dinamika strategi global dan regional yang dilaksanakan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara mitra kawasan lainnya. Kebijakan yang ditetapkan oleh negara-negara ini,

baik secara langsung melalui kerja sama maupun secara tidak langsung melalui manuver geopolitik, akan berdampak pada bagaimana Indonesia merumuskan langkah-langkah strategisnya untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kapabilitas maritim nasional.

Amerika Serikat sebagai mitra strategis Indonesia telah menunjukkan komitmen kebijakan luar negeri yang kuat dalam memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Komitmen ini ditunjukkan melalui berbagai dokumen kebijakan resmi seperti *Indo-Pacific Strategy* dan *National Defense Strategy* yang menempatkan kerja sama pertahanan maritim sebagai salah satu pilar utama dalam menghadapi meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Pemerintah AS melalui Departemen Pertahanan aktif menjalin kemitraan dengan negara-negara Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, guna memastikan keamanan jalur pelayaran internasional, kebebasan navigasi, dan upaya pencegahan ekspansi militer Tiongkok. Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga mencerminkan respons strategis terhadap konfigurasi kebijakan negara lain yang semakin kompleks (U.S. Department of Defense 2022).

Tindakan pemerintah Tiongkok dalam memperluas klaim teritorialnya melalui pembangunan pulau buatan dan kehadiran kapal penjaga pantai bersenjata di Laut Cina Selatan menciptakan tekanan eksternal yang nyata bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia secara resmi tidak mengakui adanya tumpang tindih klaim di wilayah ZEE-nya di Laut Natuna Utara, kehadiran agresif kapal Tiongkok tetap dipandang sebagai bentuk ancaman

terhadap kedaulatan. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin ofensif di kawasan maritim turut mempengaruhi keputusan Indonesia untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Dengan meningkatkan intensitas latihan militer bersama, pembangunan pusat pelatihan maritim, dan pertukaran informasi intelijen, Indonesia berupaya menyeimbangkan kekuatan regional sebagai bentuk respons terhadap kebijakan negara lain yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional (Mahendra, 2023).

Selain Amerika Serikat dan Tiongkok, negara-negara mitra lainnya seperti Jepang, Australia, India, dan anggota ASEAN juga menerapkan kebijakan luar negeri dan pertahanan yang turut membentuk struktur eksternal tempat Indonesia mengambil keputusan. Jepang, misalnya, melalui inisiatif *Free and Open Indo-Pacific* mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam kerja sama pertahanan kawasan dengan menekankan stabilitas hukum laut internasional. Australia aktif dalam *ADMM-Plus* dan latihan *RIMPAC*, sementara India memperluas diplomasi militernya melalui *Act East Policy*. Semua kebijakan ini memperlihatkan bahwa kawasan Indo-Pasifik saat ini bukan hanya menjadi arena persaingan dua kekuatan besar, melainkan ruang interaksi aktif berbagai negara yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat mengabaikan konteks eksternal ini dalam menentukan mitra strategis dan bentuk kerja sama yang akan dijalankan (Nakamura, 2021).

Kebijakan pemerintah Indonesia pun berkembang adaptif dalam menanggapi perubahan kebijakan negara lain. Melalui Rencana Strategis Kementerian Pertahanan 2020–2024, Indonesia menegaskan pentingnya

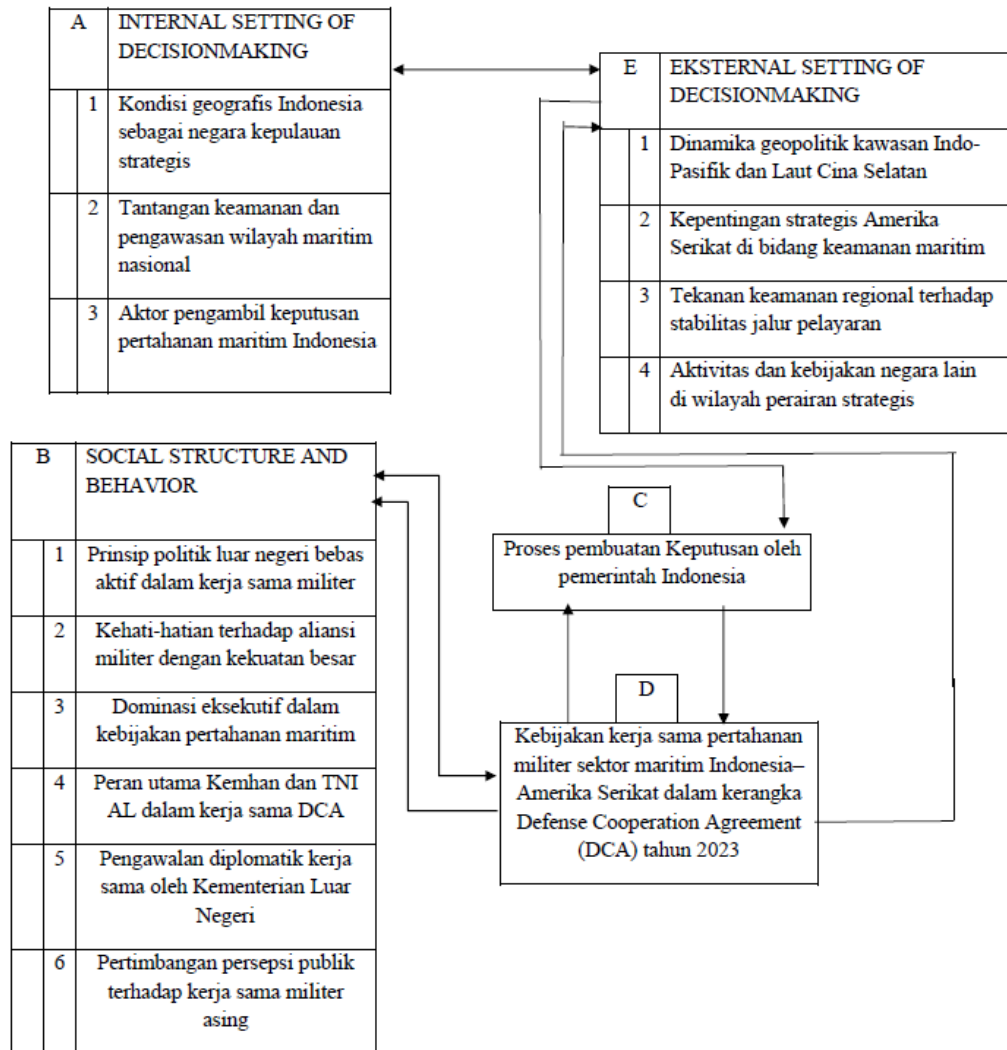
diplomasi pertahanan, peningkatan kemampuan TNI AL, dan penguatan kehadiran militer di wilayah perairan strategis sebagai bentuk respons terhadap dinamika global. Strategi ini dilaksanakan tidak secara sepihak, melainkan dengan mempertimbangkan konfigurasi tindakan negara-negara lain. Dalam praktiknya, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara menjalin kemitraan erat dengan Amerika Serikat dan tetap mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara lain di Asia Timur dan ASEAN. Dengan kata lain, kebijakan Indonesia bersifat kalkulatif terhadap perubahan tindakan negara lain yang dianggap relevan dengan kepentingan maritim nasional (Kemhan RI 2022).

Di saat yang sama, pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan bahwa kerja sama pertahanan dengan negara seperti Amerika Serikat dapat menimbulkan reaksi dari negara lain yang merasa terancam atau terganggu kepentingannya. Oleh sebab itu, diplomasi yang dijalankan Indonesia tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga simbolik menunjukkan bahwa kemitraan ini bukan bentuk keterikatan terhadap blok militer tertentu, melainkan murni untuk memperkuat kapabilitas nasional menghadapi tantangan maritim yang semakin kompleks. Pendekatan ini penting untuk menjaga netralitas strategis Indonesia dan memastikan bahwa kebijakan luar negeri tetap berada dalam kerangka bebas aktif yang telah menjadi fondasi sejak awal kemerdekaan (Rachman 2022).

Analisis terhadap elemen *societies organized and functioning as states and government action* menunjukkan bahwa dinamika kebijakan dan perilaku negara lain berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan pertahanan Indonesia. Perluasan strategi Amerika Serikat di Indo-Pasifik dan meningkatnya aktivitas

maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan menciptakan tekanan struktural yang mendorong Indonesia untuk menyesuaikan postur pertahanannya. Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil kalkulasi strategis terhadap manuver kekuatan besar dan perubahan lingkungan keamanan kawasan. Selain itu, keterlibatan negara-negara lain seperti Jepang, Australia, dan India dalam arsitektur keamanan regional turut membatasi ruang netralitas Indonesia, sehingga menuntut kebijakan luar negeri yang adaptif dan seimbang. Dengan demikian, interaksi antarnegara menjadi faktor eksternal yang secara nyata membentuk keputusan strategis Indonesia dalam menjalin kemitraan pertahanan maritim.

Gambar 2. Analisis Teori Decision Making



Sumber: (Snyder, Bruck, & Sapin 2002)

Bagan di atas menggambarkan implementasi pendekatan Decision-Making Snyder dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan Pemerintah Indonesia terkait kerja sama pertahanan maritim dengan Amerika Serikat pada tahun 2023. Faktor internal, struktur sosial dan perilaku, serta faktor eksternal tidak bekerja secara terpisah,

melainkan saling berinteraksi dan dimaknai oleh para aktor pembuat kebijakan. Proses interpretasi tersebut menghasilkan keputusan kebijakan berupa penguatan kerja sama pertahanan maritim melalui Defense Cooperation Agreement (DCA) yang bersifat adaptif, pragmatis, dan tetap berada dalam koridor politik luar negeri bebas aktif.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan pertahanan maritim Indonesia pada tahun 2023 tidak dapat dipisahkan dari konteks keamanan nasional dan dinamika kawasan Indo-Pasifik. Sejak awal, pemerintah Indonesia dihadapkan pada realitas bahwa menjaga kedaulatan maritim bukan hanya soal kemampuan militer semata, melainkan juga soal bagaimana negara mampu mengelola keterbatasan sumber daya, menjawab tuntutan publik, dan memanfaatkan peluang kerja sama internasional. Oleh karena itu, kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat menjadi pilihan yang strategis karena dinilai dapat menjawab kebutuhan mendesak sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan regional.

Kemudian kerjasama keamanan militer maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan hasil dari hubungan pertahanan bilateral yang berkembang secara historis dan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik kawasan. Kerja sama ini dilandasi oleh kepentingan strategis kedua negara, di mana Indonesia membutuhkan penguatan kapasitas pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan wilayah lautnya yang luas dan strategis, sementara Amerika Serikat berkepentingan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta kebebasan navigasi. Melalui kerangka Defense Cooperation Agreement (DCA), kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat dilembagakan secara lebih sistematis, mencakup

pelatihan dan pendidikan militer, peningkatan kapasitas pengawasan maritim, dukungan teknologi pertahanan, serta mekanisme dialog strategis yang tetap menghormati prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan tidak mengarah pada pembentukan aliansi militer formal.

Melalui penggunaan kerangka *Decision-Making Approach* dari Snyder, penelitian ini menekankan bahwa keputusan pemerintah Indonesia tidak hanya sekedar reaksi terhadap ancaman eksternal, melainkan hasil dari proses kompleks yang melibatkan persepsi, kepentingan, dan pertimbangan strategis para aktor di dalam negeri. Dalam konteks setting internal, faktor *non-human environment* seperti kondisi geografis kepulauan Indonesia dan keterbatasan alutsista, *society* berupa opini publik dan tekanan masyarakat terhadap lemahnya pengamanan laut, serta *human environment* yang mencakup peran Presiden, Kementerian Pertahanan, TNI AL, dan lembaga politik lain, menjadi penentu penting dalam arah kebijakan. Sementara itu, pada setting eksternal, *non-human environment* berupa jalur perdagangan internasional dan Laut Cina Selatan yang penuh risiko, *other cultures* seperti nilai strategis dan orientasi politik Amerika Serikat maupun Tiongkok, *other societies* yang mencerminkan dinamika masyarakat negara lain, serta *states and government action* berupa kebijakan negara besar dalam rivalitas Indo-Pasifik, turut membentuk pilihan Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjalannya *Defense Cooperation Arrangement (DCA)* pada tahun 2023 bukanlah kebijakan simbolis, melainkan cerminan dari strategi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat pertahanan maritimnya. DCA membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, mulai dari

pembangunan pusat pelatihan maritim, penguatan sistem pengawasan laut, hingga peningkatan interoperabilitas militer. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi Indonesia sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini berfokus pada kebijakan kerjasama pertahanan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat di sektor maritim pada tahun 2023 dengan menggunakan teori Foreign Policy Decision-Making dari Snyder, Bruck, dan Sapin. Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai faktor-faktor internal dan eksternal serta peran aktor utama dalam proses pengambilan keputusan pemerintah Indonesia, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam mengkaji implikasi jangka panjang dari implementasi Defense Cooperation Arrangement (DCA). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan analisis dengan menggunakan pendekatan teoritis lain, seperti balance of power atau keamanan kolektif, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak strategis kerjasama pertahanan maritim Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 13(1).
- Anityo, Alliva Saudi, Christian Herman Johan de Fretes, and Triesanto Romulo Simanjuntak. "Peningkatan Kerja Sama Militer antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Canadian Armed Forces (CAF) dalam Upaya Mendukung Sasaran Strategis Pertahanan Negara." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 03 (2024): 10-21.
- Anityo, D., et al. (2024). *Peran IPM dalam Peningkatan Kapasitas Maritim Indonesia*. *Jurnal Keamanan Maritim*, 5(2), 14–29.
- Antoni, H. (2022). Pengembangan Pembangunan Industri Perkapalan Nasional Dalam Mendukung Keamanan Pertahanan Indonesia Untuk Menjaga Kedaulatan Perairan Di Wilayah Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia*, 10(1). jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/105
- Anwar, D. F. (2021). Indonesia's Foreign Policy and Regional Security in the Indo-Pacific Era. *Asian Survey*, 61(4), 671-688.
- Arsana, I. M. A. (2020). *Potensi Konflik di Laut Natuna Utara dan Implikasinya terhadap Keamanan Nasional*. *Jurnal Geopolitik Maritim*, 2(1), 14–25.
- Asdiarti, Riwana, and Nurjannah Abdullah. "Strategi Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Jepang Dalam Penanganan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 2, no. 1 (2023): 1-15.
- Attamimi, Salsabila. "Global South Corridor sebagai Instrumen Diplomasi Indonesia dalam Implementasi Kerja Sama Konektivitas Maritim." *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 9, no. 2 (2024): 182-209. <https://jurnal.kemlu.go.id/jurnal-hublu/article/view/82>
- Bila, N. S., Haqqi, H., Wijayati, H., & Al Khatib, S. R. (2024). *Pengaruh United States–Indonesia Comprehensive Partnership Agreement terhadap Kerja Sama Keamanan Maritim Amerika Serikat dan Indonesia Tahun 2015–2019*. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 9(2), 46–70.
- Bland, B. (2023). Why Indonesia Is Pivoting to the United States in Defense Cooperation. *Lowy Institute*.
- Brown, A. (2023). Brown, A. (2023). Military Aid and Its Impact on Regional Stability: A Case Study of US-Indonesia Defense Cooperation. *International Affairs Review*, 12(2), 23-40.
- Cohen, J., & Jennings, M. (2021). *Human Rights Concerns in U.S. Military Assistance: A Case Study on Southeast Asia*. *Journal of Global Policy and Security*, 9(3), 41–49.
- Crouch, Harold A. *The army and politics in Indonesia*. Equinox Publishing, 2007.
- Da Costa, G. (2024). *Indonesia, U.S. Expand Cooperation with Focus on Maritime Security, Military Modernization*. Indo-Pacific Defense Forum. Retrieved from <https://ipdefenseforum.com>
- Davis, L. (2023). Economic Interdependence and Maritime Security in Southeast Asia. *Trade and Security Review*, 9(4), 88-104.
- Emmers, R. (2014). Indonesia's role in ASEAN: A case of incomplete and

- sectorial leadership. *The Pacific Review*, 27(4), 543-562.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fatimah, N. (2023). *Respon Masyarakat Sipil terhadap Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia*. *Jurnal Demokrasi dan Keamanan*, 4(1), 80–88.
- Fitriani. (2018). *Indonesia's Maritime Security Cooperation: Strategic Opportunities and Challenges*. CSIS Indonesia.
- Fitriyani, N., & Hamzah, A. (2021). *Perbandingan Budaya Strategis Indonesia dan Amerika Serikat dalam Kerja Sama Militer*. *Jurnal Kajian Pertahanan*, 8(2), 75–86.
- Gunawan, B. (2020). *Kerjasama Pertahanan Maritim: Perspektif Indonesia dan Amerika Serikat*.
- Gunawan, M. V. (2020). Peran Amerika Serikat Dalam Memperkuat Keamanan Maritim Indonesia Tahun 2009-2019. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(21), 16-33.
- Hakim, A., & Rosmauli, S. (2022). Diplomasi Maritim Indonesia Di Tengah Ketegangan Laut China Selatan: Studi Kasus kerjasama Pertahanan Dan Keamanan Maritim Indonesia Dengan Jepang (2014-2021). *International Society*, 5(1).
- Handayani, M. A., & Prabowo, A. (2023). *Reaksi Publik Terhadap Pelanggaran Laut Natuna: Kajian Opini Masyarakat dan Media Sosial*. *Jurnal Sosial Maritim*, 5(1), 56–64.
- Indirasari, Annidya. "Indonesia-United States Defense Cooperation In The President Joko Widodo Era." *Jurnal Pena Wimaya* 2, no. 1 (2022).
- Isnaini, M. Arif, Hari Sulisty, and Rina Marlina. "Giat multilateral naval exercise Komodo dalam menjaga stabilitas perdamaian di kawasan regional sekaligus bukti Indonesia sebagai poros maritim dunia." *JEEP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 6770-6775. <https://www.jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2819>
- Iswardana, Muhammad Ridha Ridha. "Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard." *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 4, no. 1 (2021): 1-15.
- January, Ery Tri, and Agus Salim Burhanuddin. "Kerja Sama Indonesia-Australia Dalam Mewujudkan Visi International Maritime Organization (IMO) Dalam Merealisasikan Laut Bersih." *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim* 2, no. 4 (2023): 151-163. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/ocean/article/view/1608>
- Johnson, R. (2024). Navigating Power Dynamics in US-Indonesia Military Relations. *Global Defense Journal*, 15(1), 10-25.
- Kementerian Pertahanan RI. (2023). *Dokumen Strategi Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan 2023–2024*. Jakarta: Pusat Strategi Pertahanan.
- Kemhan RI. (2021). *Kerja Sama Pertahanan Indonesia dalam ADMM-Plus*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id>
- Laksamana, E. A. (2023). Navigating Tensions in the Indo-Pacific: Indonesia's Military Diplomacy and U.S. Partnership. *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 6(1), 45-60.

- Latifah, S., & Hendrawan, M. (2022). *Diplomasi Pertahanan dan Interoperabilitas Lintas Budaya dalam Program IMET*. *Jurnal Pertahanan Internasional*, 10(1), 89–96.
- Leifer, M. (1983). Indonesia's foreign policy. (*No Title*).
- Mahendra, A. G. (2023). *Ancaman Laut Cina Selatan dan Pilihan Strategis Indonesia*. *Jurnal Kajian Geopolitik*, 4(1), 39–48.
- Nakamura, Y. (2021). *The Role of ADMM-Plus in Regional Defense Cooperation*. *Journal of Southeast Asian Strategic Studies*, 6(2), 62–69.
- Pangemanan, A. E. (2019). Kebijakan Maritim Dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Lex Et Societatis*, 7(12).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27573>
- Putra, M. Y. (2022). *Dilema Netralitas Indonesia dalam Rivalitas AS–Tiongkok di Asia Tenggara*. *Jurnal Geostrategi dan Kebijakan*, 5(2), 69–75.
- Rachman, M. F. (2022). *Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia di Tengah Rivalitas Global*. *Jurnal Politik Global*, 5(2), 53–59.
- Rahman, I., & Prasetyo, A. (2023). *Persepsi ASEAN terhadap Peran Amerika Serikat di Kawasan: Dampaknya bagi Indonesia*. *Jurnal Politik Kawasan*, 5(1), 58–66.
- Rahmat, Hayatul Khairul, Rohman Syah, and Amal Ramadhani Putra. "Bantuan Kemanusiaan sebagai Alat Diplomasi Bencana: Sebuah Ulasan di Tengah Menghadapi Krisis Global." *Civil and Military Cooperation Journal* 1, no. 1 (2024): 33-42.
- Ridho, M., & Sudirman, A. (n.d.). Signifikansi Keamanan Maritim Di ASEAN. *Jurnal Ilmu hubungan Internasional*, 3(2), 65-182.
<https://doi.org/10.33822/mjih.v3i2.2174>
- Rizaldi, D., & Fahmi, M. (2022). *Diplomasi Pertahanan dan Persepsi Publik: Studi Kasus Kerja Sama RI–AS di Indo-Pasifik*. *Jurnal Strategi Global*, 6(1), 67–75.
- Samara, R. I. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Perairan Natuna. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 78-89.
<https://doi.org/10.62017/syariah.v2i1.2326>
- Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 45-62.
- Snyder, R. C. (2002). *Foreign Policy Decision-Making*. New York: Palgrave Macmillan.
- Sarlina, H., Yanti, D., Santika, S., & Hutabarat, J. S. (2024). Militer dan Politik di Indonesia dalam Konteks Ketegangan Maritim di Laut China Selatan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 124-130.
<https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/394>
- Scott, M. (2022). *U.S. Public Opinion and Strategic Priorities in the Indo-Pacific*. *The Asia Policy Journal*, 17(2), 35–42.
- Smith, J. (2024). Strategic Maritime Partnerships in Southeast Asia: The Role of the US and Indonesia. *Journal of International Security Studies*, 18(3), 45-67.

- Soplanit, Marsello Graitto, and Irmawan Effendi. "Diplomasi Maritim Indonesia Dalam ADMM-PLUS Expert Working Groups On Maritime Security Tahun 2023." *BHUVANA: Journal of Global Studies* 2, no. 2 (2024): 172-201. <https://jurnalhiusni.org/index.php/bhuvana/article/view/197>
- Stephen Burgess, S. (2023, April 24). *The US–Indonesia Strategic Partnership and Air Force Relations*. Air University. Retrieved July 17, 2024, from <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/3371476/the-usindonesian-strategic-partnership-and-air-force-relations/>
- Strangio, S. (2023, August 31). *Indonesia, US Open Military Drills Amid South China Sea Tension*. The Diplomat. Retrieved July 17, 2024, from <https://thediplomat.com/2023/08/indonesia-us-open-military-drills-amid-south-china-sea-tension/>
- Sukma, R. (2023). Indonesia's Maritime Security Challenges and Opportunities: Reinforcing Cooperation with Global Powers. *Maritime Affairs. Journal of the National Maritime Foundation of India*, 19(2), 120-135.
- United States and Indonesia Launch CARAT Indonesia 2024 Marine Exercise*. (2024, May 15). U.S. Embassy and Consulates in Indonesia. Retrieved July 17, 2024, from <https://id.usembassy.gov/united-states-and-indonesia-launch-carat-indonesia-2024-marine-exercise/>
- Widjajanti, A. (2023). *Diplomasi Pertahanan dan Peran Aktor Negara dalam Kerjasama Strategis*. *Jurnal Keamanan Global*, 7(1), 28–36.
- Yudhanto, H. (2023). *Modernisasi Alutsista dan Peran Opini Publik dalam Politik Pertahanan Indonesia*. *Jurnal Politik dan Strategi Nasional*, 4(2), 39–47.